

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM
LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ZIAN RIZKI

NIM. 200206004

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Manajemen Pendidikan Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024M/1446H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM KOTA
LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK) Uin Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu
Pendidikan Islam

Oleh:

MUHAMMAD ZIAN RIZKI

NIM. 200206004

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prodi Studi Manajemen Pendidikan Islam

Disetujui oleh:

A R Pembimbing Skripsi



Dr. Safriadi, M.Pd

NIP. 198010052010031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHAKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM KOTA
LHOKSEUMAWE**

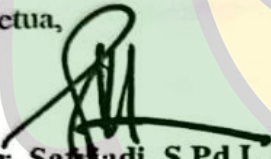
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 07 Agustus 2024 M
02 Safar 1446 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Saifuladi, S.Pd.I, M.Pd
NIP.198010052010031001

Sekretaris,


Nelliraharti, S.Pd.I, M.Pd
NIP: 198112052023212021

Penguji I,


Lailatussaadah, S.Ag, M.Pd
NIP. 197512272007012014

Penguji II


Nurussalami, S.Ag, M.Pd
NIP. 197902162014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Prof. Saiful Mukhlis, S. Ag., MA., M. Ed., Ph.D.
NIP. 197701021997031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Zian Rizki
NIM : 200206004
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah
Dalam Mempertahankan Akreditasi Di MAS
Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan saya ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Zian Rizki
NIM. 200206004

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zian Rizki
NIM : 200206004
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Manajemen Pendidikan Islam
Nim Judul : Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe
Pembimbing : Dr. Safriadi, M.Pd
Kata Kunci : *Implementasi, Manajemen Berbasis Madrasah, Akreditasi*

Manajemen berbasis madrasah merupakan konsep pengelolaan madrasah dengan prinsip kemandirian madrasah dengan kewenangan lebih untuk mengatur sendiri sesuai dengan kekhasannya. MAS Misbahul Ulum sudah melaksanakan tahapan-tahapan MBM serta prinsip-prinsipnya sehingga mampu menghasilkan akreditasi sempurna dan juga dapat mempertahankan akreditasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan implementasi manajemen berbasis madrasah dan faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendukung dalam implementasi manajemen berbasis madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakabid kurikulum dan satu orang guru bidang studi fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat MBM yaitu kurangnya bentuk kerjasama antara madrasah dengan masyarakat dalam pelaksanaan MBM, hambatan yang terjadi dapat diatasi dengan cara selalu mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan MBM dan juga melibatkan masyarakat disetiap rapat penting yang menghadirkan dari berbagai pihak madrasah seperti yayasan dan komite, bermusyawarah, mendengarkan masukan-masukan atau saran. Adapun analisis implementasi manajemen berbasis madrasah di MAS Misbahul Ulum sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya mencakup melakukan sosialisasi, memperbanyak mitra sekolah, merumuskan aturan sekolah, menerapkan prinsip-prinsip MBM yang baik, mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah, meningkatkan kapasitas sekolah, distribusi kewenangan dan tanggung jawab, dan menyusun rencana pengembangan sekolah, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Allah SWT sudah memberikan peluang buat membetulkan serta membenarkan diri dari kesalahan, sehingga jadi lebih suci serta terus menjadi dekat kepada-Nya. Dengan kekuatan-Nya pula penulis sukses menuntaskan proposal riset bertajuk **“Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah berjuang keras mengganti pola pikir umat manusia dari kebodohan mengarah dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan semacam saat ini. Tidak kurang ingat pula kepada para ulama yang sudah memperjuangkan agama yang sempurna ini.

Tujuan penyusunan proposal riset ini merupakan buat menekuni metode penataan skripsi di Universitas Islam Negari Ar-Raniry dan buat mendapatkan gelar Sarjana Pembelajaran dalam bidang Manajemen Pembelajaran Islam.

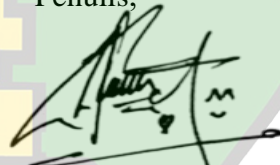
Pada peluang ini, penulis mau mengantarkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membagikan sokongan moral ataupun materil sehingga proposal riset ini bisa dituntaskan. Oleh karena melalui kata pengantar ini periset ingin mengucapkan perkataan terima kasih ini kepada:

1. Terimakasih Kasih Prof. Safrul Muluk. S.Ag., MA., M.Ed. Ph.D selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan kemudahan dan izin periset untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Safriadi, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan juga staff beserta jajarannya.

3. Dr. Safriadi, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing skripsi saya yang sudah mendidik, meluangkan waktu untuk membimbing serta membagikan tutorial dalam penyelesaian proposal ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen Manajemen Pendidikan Islam yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan lainnya pula oleh Allah SWT. Penulis menyadari kalau masih banyak kekurangan serta kelemahan dalam penyajian proposal ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan berbentuk kritik serta anjuran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini. Penulis berharap tulisan ini bisa berguna untuk kita seluruh. Aamiin ya rabbal' alamin.

Banda Aceh, 2 Mei 2024
Penulis,



A R - R A N I R Y Muhammad Zian Rizki
NIM. 200206004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji serta Syukur penulis panjatkan atas rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, yang memberikan kesehatan, keselamatan dan hidayah, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar s.rjana. Shalawat dan Salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat semangat, motivasi serta dorongan dari orang-orang terdekat. Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

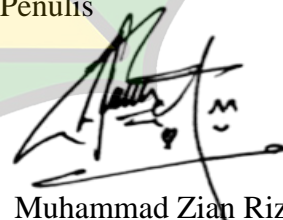
1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamak yang telah memberikan segalanya untuk penulis baik kasih sayangnya, Do'a yang tulus serta menjadi pendukung dikala anak terakhir laki-laki yang dijadikan harapan terakhirnya untuk sukses dan berguna bagi orang lain.
2. Kakak-kakak dan abang serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doanya yang sekiranya menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri yang mampu berjuang, jatuh dan selalu bangkit kembali dari kemalasannya dan masih sanggup bertahan sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada seluruh dosen-dosen prodi manajemen pendidikan Islam yang memberi masukan serta motivasinya serta membersamai proses perjalanan skripsi ini hingga selesai.

5. Kepada keluarga Besar HMPS-MPI dan IMMAPSI Wilayah I Daerah Aceh, yang sekiranya selalu memberi pengalaman, motivasi dan arahan yang menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat sekaligus keluarga penulis di tanah rantau ini yakni Keluarga Besar Pesantren Modern Misbahul Ulum dan Keluarga TITIK TEMU (emay, muhdi, hendra, arief, safir, jek, naz) yang selalu kebersamai penulis dan memotivasi dalam segala urusan perjalan sampai skripsi ini terselesaikan.
7. Selanjutnya terimakasih untuk Seseorang yang menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan prodi manajemen pendidikan islam angkatan 2020 yang memberikan saran dan motivasinya kepada penulis.

Dengan demikian akhir kata yang penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang memberikan semangat dan bantuanya walaupun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan balasan yang lebih baik.

Banda Aceh, 2 Mei 2024

Penulis



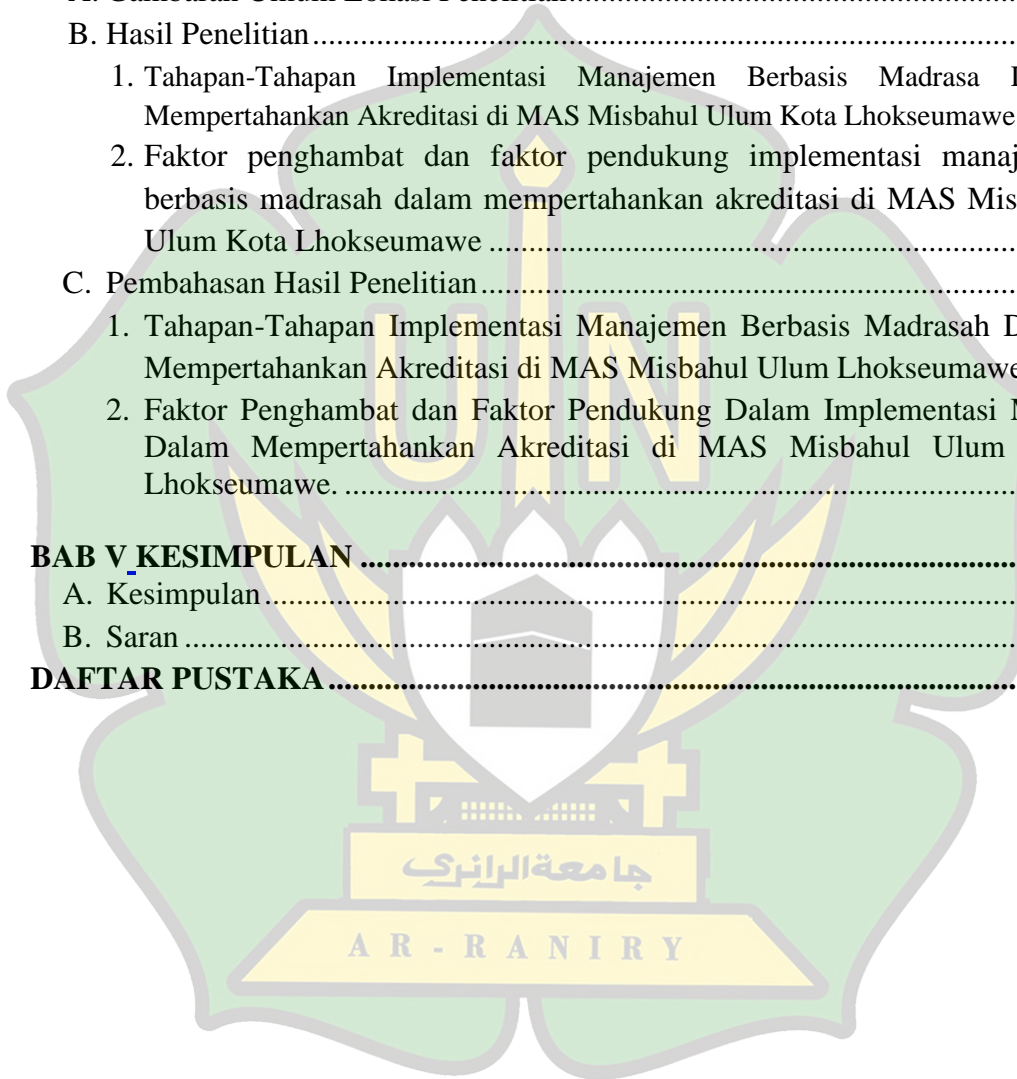
Muhammad Zian Rizki

NIM. 200206004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iv
KATAPENGANTAR.....	iiiv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Oprasional.....	11
F. Kajian Terdahulu	14
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	20
1. Pengertian Manajemen.....	20
2. Pengertian Sekolah.....	23
3. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah	24
4. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah	27
5. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah	32
6. Strategi Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah	35
B. Akreditasi Madrasah	37
1. Pengertian Akreditasi Madrasah	37
2. Landasan Hukum Akreditasi.....	40
3. Fungsi dan Tujuan Akreditasi.....	45
4. Manfaat Hasil akreditasi	48
5. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi.....	49
C. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek Penelitian	56

D. Kehadiran Peneliti	57
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	57
F. Analisis Data.....	60
G. Uji Keabsahan Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Hasil Penelitian.....	70
1. Tahapan-Tahapan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasa Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.....	71
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi manajemen berbasis madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe	71
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
1. Tahapan-Tahapan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe...	81
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi MBM Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.	81
BAB V KESIMPULAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Dengan Kepala Sekolah

Gambar 2 : Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum

Gambar 3 : Ruang Kepala Sekolah

Gambar 4 : Ruang Guru

Gambar 5 : Ruang Pembelajaran Siswa



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Analisi SWOT

Tabel 4.1 Keadaan Siswa

Tabel 4.2 Tingkat Kelulusan Siswa MA Misbahul Ulum



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari KanKemenag Kota Lhokseumawe

Lampiran 4 : Surat Persetujuan Informan

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 : Instrumen Observasi

Lampiran 7 : Daftar Wawancara

Lampiran 8 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan strategis pembelajaran nasional cocok dengan amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional merupakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). MBM merupakan pendekatan manajemen yang harus diterapkan oleh madrasah ibtidaiyah selaku bagian dari satuan pembelajaran awal, bersumber pada standar pelayanan minimal. Pelaksanaan MBM di madrasah mendesak madrasah menjadi aktif, mandiri, terbuka, serta akuntabel melakukan bermacam program kenaikan kualitas pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan madrasah itu sendiri, dengan pengambilan keputusan yang partisipatif.

MBM merupakan konsep manajemen di masa otonomi wilayah yang bertujuan buat tingkatan kualitas pembelajaran. MBM timbul dalam dunia pembelajaran serta pengaruh penerapan manajemen madrasah. Konsep ini membagikan otonomi lebih besar kepada madrasah serta mendesak mereka buat melaksanakan pengambilan keputusan secara partisipatif guna penuhi tujuan kualitas madrasah dalam kerangka pembelajaran nasional.

Pembelajaran adalah kebutuhan untuk semua orang. Semua orang butuh meningkatkan diri lewat kenaikan pengetahuan serta uraian dalam bermacam aspek kehidupan. Kenaikan pengetahuan serta uraian ini hendak berfungsi dalam tingkatan kompetensi orang sehingga sanggup bersaing dalam menunjang tuntutan kehidupan di masa depan. Salah satu metode buat tingkatan kompetensi tersebut

ditinjau dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran jadi salah satu aspek berarti dalam kehidupan manusia.¹

Salah satu metode buat tingkatkan pengetahuan serta uraian dalam bermacam aspek kehidupan merupakan lewat pelaksanaan manajemen. Manajemen adalah ilmu serta seni dalam mengendalikan proses pemanfaatan sumber energi manusia serta sumber energi yang lain secara efisien serta efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses yang dinamis serta khas dari sesuatu organisasi dalam menggapai tujuannya. Manajemen tidak dapat dilepaskan dari 4 komponen pokok, adalah: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/penerapan, serta pengawasan/ kontrol. Manajemen merupakan proses memusatkan serta memperlancar pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok resmi buat menggapai tujuan yang diidamkan.

Dalam perihal ini, manajemen yang dibutuhkan buat menggapai tujuan yang diharapkan bisa dicoba lewat manajemen madrasah. Manajemen madrasah ialah aspek yang sangat berarti dalam penyelenggaraan pembelajaran serta pengajaran. Madrasah merupakan bagian dari sesuatu lembaga pembelajaran yang wajib senantiasa menyalurkan pelayanan terbaik kepada warga luas. Keberadaan madrasah yang dekat dengan warga hendak mencerminkan kebutuhan serta kebanggaan untuk warga tersebut.²

¹ Qibtiah, Elin Asrofah; Retnowati, Rita; Laihad, Griet Helena. 2018. *Manajemen Madrasah Alam Dalam Pengembangan Karakter Pada Jenjang Madrasah Dasar Di School Of Universe*. Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.6, No.2, Juli 2018, 627).

² Nur Hidayah. *Manajemen Madrasah Menjadi Insan Berdaya Abad 21*. (Jawa Barat 2020 : Goresan Pena). h. 1

Zulkarnain Dali mendefinisikan, madrasah merupakan institusi pembelajaran universal yang mempunyai karakteristik khas Islam. Definisi ini menampilkan kalau dalam perihal modul kurikulum, madrasah mengarahkan pengetahuan universal yang sama dengan madrasah-madrasah sejenisnya. Perbandingan antara madrasah serta lembaga pembelajaran universal terletak pada penekanan pada pengetahuan agama, yang ialah karakteristik khas Islam, dan statusnya selaku lembaga pembelajaran resmi yang diawasi oleh Kementerian Agama. Madrasah mempunyai fokus lebih pada mata pelajaran agama, khususnya Islam, ataupun lebih dikenal Madrasah Agama Berikutnya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan lembaga pembelajaran yang setara dengan Madrasah Bawah (SD) serta mempunyai persamaan mendasar. Persamaan tersebut paling utama nampak dalam standar pembelajaran yang merujuk pada 8 standar pembelajaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Pergantian Standar Nasional Pembelajaran.

Sistem madrasah diwajibkan mempunyai konsep strategis yang cocok buat memberdayakan tenaga kependidikan lewat kerjasama, membagikan peluang kepada staf pembelajaran buat tingkatkan kualifikasi handal mereka, serta mendesak partisipasi segala staf pembelajaran dalam bermacam aktivitas yang menunjang program madrasah. Ini tercantum: 1) memberdayakan staf pembelajaran lewat kerjasama, di mana dalam tingkatkan profesionalisme staf pembelajaran, madrasah wajib mengutamakan kerjasama dengan staf pembelajaran ataupun pihak lain yang ikut serta dalam melakukan aktivitas; 2) memberikan peluang kepada staf pembelajaran buat tingkatkan kualifikasi mereka secara persuasif; serta 3)

manajemen madrasah wajib berupaya mendesak partisipasi seluruh staf pembelajaran dalam tiap aktivitas di madrasah (partisipatif).³

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 mengendalikan pengelolaan lembaga pembelajaran. Bagi peraturan tersebut, pengelolaan pembelajaran merupakan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyelenggara pembelajaran yang didirikan warga, serta satuan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung cocok dengan tujuan pembelajaran nasional. Berikutnya, pada Pasal 49 Ayat 1 dipaparkan kalau pengelolaan satuan ataupun program pembelajaran anak umur dini, pembelajaran bawah, serta pembelajaran menengah dilaksanakan bersumber pada standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah/ Madrasah (MBM/M).

Pasal 54 Ayat 4 meningkatkan kalau pengelolaan pembelajaran pada tingkatan bawah serta menengah wajib dipertanggungjawabkan oleh satuan pembelajaran kepada rapat dewan pendidik serta komite madrasah. Dengan merujuk pada standar ini, nampak kalau pengelolaan pembelajaran di madrasah adalah bagian dari standar pengelolaan yang mengaitkan komite madrasah yang terdiri dari faktor stakeholders, orang tua siswa, serta masyarakat.

Menyadari perihal ini, pemerintah sudah melaksanakan penyempurnaan sistem pembelajaran, baik lewat penyusunan fitur lunak (aplikasi) ataupun fitur keras (hardware). Upaya tersebut tercantum dikeluarkannya Undang- Undang No

³ Wahab, dkk. *Tiga Pilar Manajemen Mutu Madrasah Ideal (Sebuah Bunga Rampai Tentang Implementasi Tiga pilar MBM di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat)*. (Yogyakarta. CV Arti Bumi Intaran 2015). h, 9

22 serta 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Wilayah, dan penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pembelajaran Nasional yang berakibat langsung pada perencanaan, penerapan, serta penilaian pembelajaran. Bila lebih dahulu manajemen pembelajaran ialah wewenang pusat dengan paradigma top-down ataupun sentralistik, dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan bergeser kepada pemerintah kota serta kabupaten dengan paradigma bottom-up ataupun desentralistik, yang tercermin dalam pemberdayaan madrasah. Diharapkan kalau buat tingkatkan kualitas pembelajaran, keputusan sepatutnya terbuat oleh mereka yang terletak di garis depan (line staff), yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan serta langsung terbawa-bawa olehnya, ialah guru serta kepala madrasah.

Konsep MBM berasal dari kebutuhan pelaksanaan kebijakan desentralisasi serta otonomi wilayah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Wilayah serta No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Wilayah (yang mengambil alih Undang-Undang No 22 serta No 25 Tahun 1999) sudah menciptakan pergantian dalam bermacam aspek kehidupan, tercantum dalam penyelenggaraan pembelajaran. Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah menghasilkan kebijakan desentralisasi serta otonomi, yang mengizinkan pemerintah wilayah buat mengendalikan wilayahnya sendiri sembari senantiasa melindungi pengawasan dari pemerintah pusat.⁴

Kasus di atas sepatutnya bisa teratasi bersamaan dengan diberlakukannya Undang- Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Wilayah serta Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Wilayah.

⁴ Hidayat dan Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan*. (Bandung : Kaukaba 2012). h, 53

Undang-undang tersebut melibatkan konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan wilayah sehingga memberikan lebih banyak otonomi, tercantum dalam perihal pembelajaran.

Undang-undang tersebut memanglah membagikan pemecahan untuk bermacam perkara yang dialami oleh madrasah. Tetapi, keraguan menimpa posisi madrasah selaku lembaga pembelajaran membuat madrasah senantiasa terletak di dasar naungan Kementerian Agama dengan sistem sentralisasi yang terkadang berlawanan dengan prinsip Undang-Undang Otonomi Wilayah. Sementara itu, secara hukum, madrasah serta lembaga pembelajaran Islam yang lain telah terintegrasi dalam sistem pembelajaran nasional semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pembelajaran Nasional. Masa otonomi dengan prinsip desentralisasi menuntut partisipasi serta pemberdayaan segala komponen pembelajaran dan pelaksanaan konsep pembelajaran selaku suatu sistem. Kenaikan kualitas pembelajaran dalam kerangka otonomi wilayah mengganti arah serta paradigma penyelenggaraan dari pola sentralisasi dan desentralisasi. Salah satu model penyelenggaraan pembelajaran buat menggapai kualitas pembelajaran yang cocok dengan paradigma desentralisasi dikala ini merupakan konsep School Based Management (SBM)/Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBM muncul selaku upaya untuk mengorientasikan kualitas dalam penyelenggaraan pembelajaran.

MBM diseleksi merupakan salah satu pendekatan dalam masa desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini jadi salah satu alternatif program desentralisasi di bidang pembelajaran. Model MBM mempunyai kemampuan buat

menggalakkan partisipasi warga, tingkatkan efisiensi, serta membetulkan manajemen pada tingkatan madrasah. Lebih lanjut, implementasi MBM meliputi 3 aspek utama, ialah: 1) gaya kepemimpinan yang demokratis, inklusif, serta terbuka, 2) Budaya organisasi yang sehat serta area kerja yang kondusif; serta 3) Memegang teguh prinsip profesionalisme di dalam area kerja yang bersangkutan.⁵

Dari bermacam penafsiran MBM, penerapan MBM di satuan pembelajaran madrasah sesungguhnya terpaut dengan gimana proses penentuan kebijakan madrasah wajib dicoba oleh madrasah itu sendiri. Konsep MBM menekankan kalau penentuan kebijakan wajib mengaitkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembelajaran di madrasah.

Pergantian dari Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 jadi Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pembelajaran sesungguhnya ialah langkah konkret buat tingkatkan kualitas pembelajaran. Standar-standar yang tercantum dalam 8 standar nasional pembelajaran tersebut merupakan dimensi yang hendak digunakan buat mengevaluasi kinerja manajemen pembelajaran dalam sistem pembelajaran nasional. Pada awal mulanya, standar yang digunakan adalah standar minimum, namun kualitas pembelajaran hendak tercermin sepanjang mana standar- standar tersebut sudah tercapai serta tingkatkan kualitasnya dari standar minimum mengarah standar yang lebih besar. Upaya tingkatkan kualitas pembelajaran hendak terus dicoba, serta kualitas tersebut bisa diukur dengan kenaikan standar dari standar minimum mengarah standar yang lebih

⁵ M Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta 2003). h.94

besar. Inilah inti dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang jadi tujuan utama dalam pembelajaran.⁶

Pemicu utama rendahnya kualitas pembelajaran merupakan kelancaran proses pendidikan yang terhambat serta suasana madrasah yang tidak menunjang, semacam rusaknya gedung madrasah, kekurangan perlengkapan belajar, serta kekurangan guru paling utama di daerah-daerah yang terdampak bencana. Tidak hanya itu, faktor-faktor lain yang menimbulkan rendahnya kualitas pembelajaran meliputi: 1) ketidakhadiran guru yang tidak handal, semacam keterlambatan masuk mengajar; 2) minimnya ketersediaan fitur pendidikan yang lengkap; 3) kekurangan media pendidikan yang dibutuhkan buat menerangkan modul pendidikan; serta 4) minimnya koordinasi antara kepala madrasah serta guru dan minimnya penghargaan dari kepala madrasah terhadap guru yang berprestasi.⁷

Penanda kenaikan kualitas pembelajaran adalah bagian berarti dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Buat tingkatkan penanda kenaikan kualitas pembelajaran, madrasah butuh mempunyai: 1) sokongan pemerintah; 2) kepemimpinan kepala madrasah yang efisien; 3) kinerja guru yang baik; 4) kurikulum yang relevan; 5) lulusan yang bermutu; 6) budaya organisasi yang efisien; serta 7) sokongan warga serta orang tua siswa. Pendapat Sunarto, salah satu pemicu rendahnya kualitas pembelajaran merupakan sedikitnya partisipasi warga dalam menetapkan kebijakan madrasah sebab minimnya rasa mempunyai serta

⁶ Suparlan, *Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dari Teori sampai dengan Praktik*. (Jakarta : Bumi Aksara 2013). h.98

⁷ Sulaiman, Hasmiana, Asmaini, *Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SD Negeri 10 Banda Aceh*. Jurnal Pesona Dasar Vol. 3 No.3, April 2015, h. 33- 43

tanggung jawab dalam melindungi serta menunjang madrasah tempat kanak-kanak mereka bersekolah.

Kenaikan kualitas pembelajaran merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan zona pembelajaran nasional serta ialah bagian tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara merata.

Keberhasilan MA di Kota Lhokseumawe, baik swasta maupun negeri yang berjumlah 9 madrasah, buat tumbuh serta jadi referensi warga bisa dicapai lewat pengelolaan manajemen yang baik memakai konsep MBM. MA Misbahul Ulum di Kota Lhokseumawe merupakan contoh yang berhasil dalam mempraktikkan MBM, tercermin dalam pencapaian akreditasi yang sangat baik sepanjang sebagian tahun terakhir, ialah peringkat A. Keberhasilan ini bisa diatribusikan pada pengelolaan madrasah yang efisien dengan memakai MBM. Pelaksanaan MBM di MA tersebut pula jadi pemecahan yang baik dalam konteks model pendidikan, sebab meminimalisir ketergantungan pada kebijakan pemerintah, paling utama dalam perihal pembiayaan. Perihal ini mempunyai akibat yang signifikan dalam memusatkan pertumbuhan MA di Kota Lhokseumawe.

Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Berbasis Madrasah tersebut. Sehingga peneliti akan membahas dengan judul skripsi "**Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi Di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe**".

B. Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi MBM dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana analisis tahapan-tahapan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas, hingga tujuan dari riset ini merupakan sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenali faktor penghambat serta faktor pendukung dalam implementasi MBM dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.
2. Menganalisis tahapan-tahapan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Tujuan dari riset ini merupakan buat memperluas cakupan pengetahuan serta pengalaman terpaut implementasi manajemen berbasis sekolah.
- b. Riset ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen pembelajaran Islam, paling utama dalam konteks manajemen berbasis madrasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk kepala sekolah, hasil riset ini diharapkan bisa jadi landasan buat tingkatkan keahlian kepemimpinan dalam mengelola sekolah dengan mempraktikkan konsep manajemen berbasis sekolah guna mempertahankan akreditasi madrasah.
- b. Untuk guru, hasil riset ini diharapkan bisa jadi pedoman buat tingkatkan kinerja dalam proses pengajaran dan dalam mengelola aspek manajemen berbasis madrasah buat menunjang pemeliharaan akreditasi madrasah.
- c. Untuk warga ataupun masyarakat sekolah, riset ini diharapkan bisa tingkatkan pemahaman hendak berartinya kedudukan dan dalam tingkatkan kualitas madrasah dan dalam menggapai serta mempertahankan akreditasi madrasah.
- d. Untuk peneliti, riset ini diharapkan bisa jadi sumbangan dalam pengetahuan dan pengalaman baru terpaut dengan konsep manajemen berbasis madrasah dalam konteks mempertahankan akreditasi madrasah, dan selaku fasilitas buat mengukur serta meningkatkan keahlian periset dalam bidang tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman isi Proposal ini, berikut adalah penjelasan beberapa istilah:

1. Implementasi

Implementasi bisa dipaparkan selaku proses ekspansi kegiatan yang mencocokkan interaksi antara tujuan serta aksi buat mencapainya, membutuhkan jaringan pelaksana, dan birokrasi yang efisien. Guntur Setiawan menggambarkan implementasi selaku penerapan rencana yang sudah disusun secara matang serta terperinci.⁸ Implementasi umumnya terjalin sehabis sesi perencanaan dikira telah sempurna. Nurdin Usman melaporkan kalau implementasi mengaitkan kegiatan, aksi, ataupun aksi yang terencana, dan mekanisme sistem. Implementasi tidaklah semata-mata aktivitas, melainkan sesuatu aksi yang direncanakan buat mencapai tujuan tertentu.⁹ Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan penerapan ataupun pelaksanaan. Secara universal, implementasi merujuk pada aksi ataupun penerapan dari suatu rencana yang sudah disusun dengan teliti serta rinci.

2. Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) mempunyai 3 kata kunci, ialah manajemen, berbasis, serta madrasah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris "to manage" yang memiliki makna mengurus, mengendalikan, melakukan, serta mengelola. Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen didefinisikan selaku proses pemakaian sumber energi secara efisien buat mencapai tujuan tertentu. Manajemen ialah serangkaian aktivitas

⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka, Jakarta, 2004), h. 39

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), h.

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian dalam suatu organisasi dengan bermacam aspeknya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien serta efektif. Kata "berbasis" mempunyai pangkal kata bawah "basis", yang maksudnya bawah ataupun asas. Kata "sekolah" mempunyai 2 definisi selaku berikut:

- a. Bangunan ataupun institusi tempat belajar serta mengajar, di mana pembelajaran diberikan serta diterima. Ini merupakan tempat di mana proses pendidikan berlangsung.
- b. Waktu ataupun tahap kala siswa menerima pelajaran. Ini merujuk pada waktu ataupun pertemuan di mana pendidikan dicoba.

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan sistem pengaturan pembelajaran di mana staf madrasah seluruhnya mempunyai kebebasan buat setuju dalam menggunakan seluruh sumber energi serta sarana belajar yang ada buat menyelenggarakan pembelajaran untuk siswa. Mereka pula bertanggung jawab atas seluruh aksi terpaut.

Inti dari Manajemen Berbasis Madrasah merupakan pengaturan serta koordinasi sumber energi secara mandiri serta fleksibel di dasar kepemimpinan kepala madrasah. Ini mengaitkan pemakaian beberapa prinsip manajemen buat merumuskan kebijakan guna mencapai tujuan sekolah, yang didasarkan pada kebijakan pembelajaran nasional. Proses ini pula mengaitkan partisipasi langsung dari seluruh pihak yang terpaut dengan madrasah, tercantum warga, dalam pengambilan keputusan.

3. Akreditasi Madrasah

Akreditasi merupakan proses evaluasi yang dicoba oleh pemerintah terhadap sekolah, baik swasta ataupun negara, buat memastikan tingkatan pengakuan formal pemerintah terhadap mutu pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut.¹⁰ Dikala ini, kebijakan akreditasi diterapkan pada madrasah secara merata, tercantum madrasah negeri serta swasta.

Akreditasi madrasah merupakan penilaian merata terhadap kecukupan serta mutu program pembelajaran ataupun lembaga pembelajaran itu sendiri. Hasil dari penilaian ini dituangkan dalam wujud pengakuan serta evaluasi kelayakan lewat penerbitan sertifikat oleh lembaga independen serta handal yang diketahui selaku Badan Akreditasi Nasional–Sekolah/Madrasah (BANS/M).

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "akreditasi" merujuk pada pengakuan yang diberikan kepada suatu lembaga pembelajaran oleh tubuh yang berwenang sehabis memperhitungkan kalau lembaga tersebut penuh standar ataupun kriteria tertentu yang diresmikan”.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merujuk pada riset yang sudah dicoba lebih dahulu oleh periset lain serta sudah menciptakan penemuan empiris. Tujuan dari kajian

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 256

terdahulu ini merupakan buat membolehkan periset menguasai serta menyamakan riset yang lagi dikerjakannya dengan riset yang sudah dicoba oleh periset lain.

Dalam jurnal "Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah" yang ditulis oleh Sri Nurabdiah Pratiwi, di informasikan kalau konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan buat tingkatan mutu pembelajaran, paling utama di tingkat lokal maupun wilayah. Dengan pelaksanaan MBS, sekolah serta warga tidak butuh menunggu perintah ataupun arahan dari pusat, namun bisa meningkatkan visi pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan serta keadaan di wilayah mereka, dan melakukan visi tersebut secara mandiri. Periset menegaskan kalau tujuan utama pelaksanaan MBS merupakan buat tingkatan efisiensi pengelolaan, kualitas, serta relevansi pembelajaran di sekolah.¹¹

Dalam jurnal yang bertajuk "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Efisien" yang ditulis oleh Abdullah Hadziq, dipaparkan kalau sekolah diharapkan bisa jadi lembaga yang sanggup menciptakan sumber energi manusia bermutu. Mutu sekolah bisa diukur lewat sebagian penanda, tercantum layanan belajar siswa, pengelolaan serta pelayanan siswa, sarana serta fasilitas sekolah, program serta pendanaan, partisipasi warga, dan budaya sekolah. Dalam riset tersebut, ditemui 4 model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ialah:

- 1) Kontrol administratif, di mana kedudukan dominan kepala sekolah selaku representasi dari administrasi pembelajaran.
- 2) Kontrol handal, di mana pendidik

¹¹ Diakses dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/download/578/pdf/17>, pada tanggal 07 November 2023

mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan 3) Kontrol warga, di mana kelompok warga serta orangtua siswa, lewat Komite Sekolah, ikut serta dalam aktivitas sekolah 4) Kontrol secara balance, di mana orang tua siswa serta kelompok handal semacam kepala sekolah serta pendidik bekerja sama secara balance.

Dalam jurnal yang bertajuk "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Handal Guru di SD Negeri 10 Banda Aceh" yang ditulis oleh Sulaiman, Hasmiana, serta Asmaini, dipaparkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan kepada sekolah buat merumuskan kebijakan yang bisa tingkatkan kualitas pembelajaran. MBS mempunyai sebagian tujuan utama, ialah (1) Mensosialisasikan konsep bawah manajemen pembelajaran kualitas berbasis sekolah, paling utama kepada masyarakat. (2) Mendapatkan masukan supaya konsep manajemen bisa diaplikasikan dengan gampang cocok dengan keadaan area Indonesia yang mempunyai keragaman budaya. (3) Tingkatkan pengetahuan pengetahuan warga sekolah serta orang yang hirau terhadap pembelajaran, spesialnya dalam perihal kenaikan kualitas pembelajaran (4) Memotivasi warga sekolah buat berpikir tentang kenaikan kualitas pembelajaran. (5) Menggalang pemahaman warga sekolah buat aktif dalam menunjang kenaikan kualitas Pembelajaran. Dengan terdapatnya MBS, diharapkan guru bisa jadi handal cocok dengan tujuan pembelajaran nasional serta relevan dengan tuntutan pertumbuhan warga.¹²

¹² Diakses dari <http://e-repository.unsyiah.ac.id/PEAR/article/download/7512/6183>, pada tanggal 07 November 2023

Dalam jurnal yang bertajuk "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kenaikan Kualitas Pembelajaran pada MTsN Grong-Grong Kabupaten Pidie" yang ditulis oleh Muhammad Judin, Cut Zahri Harun, serta Sakdiah Ibrahim, dipaparkan kalau tujuan dari pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan buat tingkatkan kualitas pembelajaran secara berkepanjangan. Kenaikan kualitas tersebut dicoba secara bertahap dengan sasaran yang bisa diukur lewat tata kelola sekolah yang baik. Tujuan pelaksanaan MBS di sekolah merupakan buat tingkatkan kinerja sekolah dengan memberikan kewenangan serta tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, yang dilaksanakan bersumber pada prinsip- prinsip tata kelola sekolah yang baik, adalah partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Kinerja sekolah mencakup kenaikan mutu, daya guna, efisiensi, produktivitas, serta inovasi pembelajaran.

Dalam jurnal yang bertajuk "Manajemen Berbasis Sekolah lewat Optimalisasi Penilaian Diri Sekolah buat Menunjang Kenaikan Prestasi Sekolah" yang ditulis oleh Siti Sugiarti serta Mulyoto, dipaparkan kalau implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pembelajaran sepatutnya mencakup seluruh tahapan manajemen dengan baik. Pada sesi perencanaan, MBS memerlukan rencana program yang mengaitkan stakeholder, tetapi masih ada ketidaksesuaian dengan rencana yang tercantum dalam tujuan sekolah. Pada sesi pengorganisasian, MBS mewajibkan stakeholder buat bekerja cocok dengan tugas pokok yang diberikan kepada mereka, namun masih terdapat stakeholder yang menyangka kalau pembagian tugas cuma selaku formalitas. Pada sesi penerapan, MBS menekankan berartinya penilaian yang dicoba secara teratur tiap tahun buat

memantau sepanjang mana program sekolah sudah berjalan, tetapi masih ada penilaian di mana penerapannya cuma buatenuhi kewajiban dari Dinas Dikpora.¹³

Dalam jurnal yang bertajuk "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum SMP Islam Ma'arif 02 Malang" yang ditulis oleh Tjatur Yuli Winarsih, dipaparkan kalau implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berfokus pada prinsip partisipasi, transparansi, kreativitas, inovasi, serta akuntabilitas hendak menciptakan sekolah yang lebih fleksibel. Dalam wujud yang nyata, sekolah hendak lebih responsif terhadap masalah- masalah serta aktivitas belajar mengajar yang timbul. Implementasi MBS pula hendak mendesak tanggung jawab bersama antara sekolah serta warga dalam melaksanakan program pembelajaran di sekolah. Apabila implementasi MBS dicoba dengan benar cocok konsepnya, hingga perihal tersebut hendak tingkatkan mutu pembelajaran lewat pengembangan kurikulum. Kurikulum Tingkatan Satuan Pembelajaran merupakan kurikulum yang dibesarkan serta dilaksanakan di tiap satuan pendidikan.¹⁴

Dari kajian terdahulu diatas terdapat beberapa kesamaan judul penelitian yaitu implementasi manajemen berbasis madrasah/sekolah, supaya tidak terjadi pengulangan, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi Di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam memilih judul ini, yaitu: Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan lokasi peneliti pada kali ini, yaitu si MAS

¹³ Diakses dari <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp/article/download/3443/2145>, pada tanggal 07 November 2023

¹⁴ Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/download/1906/2011/4514>, pada tanggal 07 November 2023

MISbahul Ulum Kota Lhokseumawe. Dan fokus penelitian ini pada implementasi manajemen berbasis madrasah yang diterapkan oleh MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

1. Pengertian Manajemen

Sampai saat ini belum ada konsep tentang pengertian manajemen yang diterima secara universal. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan sudut pandang masing-masing para ahli. Ensiklopedia menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efektif dan efisien.¹⁵ Manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengendalikan. Manajemen pula kerap dikira selaku seni, ialah seni mengendalikan orang lain supaya mereka bahagia bekerja serta bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah diresmikan. Dengan demikian, manajemen dikira selaku seni dalam menuntaskan pekerjaan supaya terencana mengarah tujuan organisasi. Dalam konteks terminologi berikut ini disajikan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen:¹⁶

- a) Terry: *Management is the district process of planning, organizing, implementing, controlling, which is carried out to determine and achieve set goals using human and other resources*

¹⁵ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd "Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam Aktivitas Manajerial di Sekolah atau Madrasah, (Yogyakarta:LkiS,2020).h.5

¹⁶ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd "Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam..., (Yogyakarta:LkiS,2020).h.5

- b) Stoner: *Management is a planning process, Organizing, leading and controlling organizational efforts members and the use of other organizational resources on the part of others to achieve stated organizational goals.*
- c) Sergiovanni, Burlingame, Coombs, and Thurston: *Management is the process of working with and through other people to achieve organizational goals efficiently.*
- d) Koontz dan Weihrich: *Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups.*
- e) Siagian: Suatu aktivitas menggerakkan orang lain untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- f) Atmosudirdjo: Menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain.

Dari berbagai pengertian manajemen yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa, manajemen adalah proses mengelola sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengertian ini mengandung beberapa unsur sebagai berikut:¹⁷

- a) Manajemen sebagai suatu proses hal ini mengandung arti bahwa, (1) sumber-sumber daya yang semula tidak berhubungan diintegrasikan menjadi suatu sistem menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi,

¹⁷Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*,(Yogyakarta:LkiS,2020).h.6

(2) secara sistematis semua sumber daya manusia organisasi harus melaksanakan aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi.

- b) Dalam aktivitas manajemen melibatkan sumberdaya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Aktivitas manajemen dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi.
- d) Pencapaian tujuan diupayakan secara efektif dan efisien. Yang dimaksud efektif dalam konteks manajemen adalah banyaknya hasil atau tujuan yang dicapai atau efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat/derajat pencapaian tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengertian efisien memiliki konotasi dengan banyaknya ongkos/biaya (korban) yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

2. Pengertian Sekolah/Madrasah

Pengertian sekolah menurut beberapa pandangan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:¹⁸

- a) Postman and Weingartner: Schools as institutions are a particular set of important functions served in our society.

¹⁸ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*,”(Yogyakarta:LkiS,2020).h.7-8

- b) Gorton: the concept of Of team (school) suggests a group of people working together cooperatively, rather than unilaterally, to achieve a common goal.
- c) Fatah: sekolah adalah wadah atau tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, pengertian sekolah/madrasah dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, (1) sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana melakukan layanan proses pendidikan, (2) sekolah sebagai sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan: aktivitas (belajar mengajar, dan pembinaan), elemen-elemen (kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa) yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan, dan (3) sekolah sebagai organisasi adalah suatu sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

3. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah

Istilah School Based Management, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah (MBS/M). Model manajemen ini pertama muncul dan populer di Amerika

¹⁹ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*,”(Yogyakarta:LkiS,2020).h.7-8

Serikat. Menurut Murphy secara konseptual ada perbedaan para pakar dalam memaknai MBS. Short and Creer, MBS merupakan strategi untuk pemberdayaan semua individu di sekolah. Sedangkan Etheridge MBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa, dan masyarakat yang berada di dekat sekolah dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, David mendefinisikan MBS sebagai otonomi sekolah yang disertai dengan pengambilan keputusan partisipatif. Caldwell membuat definisi MBS sebagai kewenangan mengalokasikan sumberdaya yang didesentralisasikan.²⁰

Dalam UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem pembelajaran nasional pada bagian uraian pasal 51 ayat 1 “Manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah merupakan wujud otonomi manajemen pembelajaran pada satuan pembelajaran, yang dalam perihal ini kepala sekolah maupun madrasah serta guru dibantu oleh komite sekolah maupun madrasah dalam mengelola aktivitas pembelajaran”.²¹

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan paradigma baru yang membagikan otonomi yang luas kepada madrasah dalam kerangka kebijakan pembelajaran nasional. Otonomi tersebut membolehkan madrasah buat mengelola tenaga pendidik serta dana dengan lebih bebas, dengan mengalokasikannya cocok dengan prioritas kebutuhan, dan jadi lebih responsif

²⁰Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*,”(Yogyakarta:LkiS,2020).h.9

²¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 19.

terhadap kebutuhan lokal. Keterlibatan warga bertujuan supaya mereka bisa menguasai, menolong, serta mengendalikan pengelolaan pembelajaran.²²

Jadi, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah sesuatu wujud manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi ataupun tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak madrasah buat merancang serta mengelola aktivitas pembelajaran guna tingkatkan mutu pembelajaran. Dalam konsep ini, segala tenaga di madrasah serta warga dekat ikut ikut serta secara mandiri serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan program-program pendidikan.

a. Tujuan dan karakteristik penerapan manajemen berbasis madrasah

Menurut Chapman MBS merupakan pendekatan yang bertujuan mengelola sekolah dengan memberikan kewenangan, partisipasi warga sekolah, dan masyarakat dalam perbaikan kinerja sekolah. Departemen Pendidikan Nasional merumuskan tujuan MBS adalah untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah/madrasah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya, diharapkan:²³

- a) Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sekolah*, (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2000), h. 81

²³ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*”,(Yogyakarta:LkiS,2020).h.14

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.

- b) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada: pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu, pendidikan yang telah direncanakan.
- d) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

Levacic mengidentifikasi tiga tujuan MBM, pertama, efisiensi artinya dengan MBM proses peningkatan mutu pendidikan berlangsung secara efisien khususnya yang terkait dengan penggunaan sumberdaya manusia. Kedua, efektif, maksudnya dengan MBS mutu pendidikan akan meningkat melalui peningkatan mutu pembelajaran. Ketiga, tanggungjawab, dengan MBM respon terhadap siswa akan lebih meningkat dan tanggung jawab terhadap stakeholder akan lebih dapat ditingkatkan.

Selanjutnya karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Karakteristik output
- b) Karakteristik proses
- c) Karakteristik input pendidikan

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada sekolah buat mengambil keputusan, dan bertanggung jawab serta akuntabel atas resiko keputusan tersebut. Seluruh pihak yang ikut serta dalam manajemen sekolah wajib mengutamakan khasiat untuk prestasi belajar siswa.

MBM berarti desentralisasi yang berikan wewenang kepada sekolah dalam melaksanakan kerangka kerja yang diresmikan oleh pusat, yang mencakup kebijakan, tujuan, standar, kurikulum, serta akuntabilitas. Pemerintah menginginkan pergantian signifikan di sekolah supaya hasil belajar siswa bertambah dalam bermacam suasana ataupun lewat transformasi sekolah.

4. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah

Konsep manajemen berbasis madrasah (MBM) esensinya adalah peningkatan otonomi sekolah, partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MBM sudah sepantasnya menerapkan pendekatan ideografik (membolehkan adanya

²⁴ Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam...*”,(Yogyakarta:LkiS,2020).h.16

berbagai cara melaksanakan MBM) dan bukan lagi menggunakan pendekatan nomotetik (cara melaksanakan MBM yang cenderung seragam/ konformitas untuk semua sekolah). Oleh karena itu, dalam arti yang sebenarnya, tidak ada satu resep pelaksanaan MBM yang sama untuk diberlakukan ke semua sekolah. Menurut Rohiat tahap-tahap pelaksanaan MBM atau MBS adalah seperti berikut:²⁵

1) Melakukan sosialisasi MBM

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait. Oleh karena itu, hasil kegiatan pendidikan di sekolah merupakan hasil kolektif dari semua unsur sekolah. Dengan demikian, semua unsur sekolah harus memahami konsep MBM (apa, mengapa dan bagaimana). Sekolah harus mensosialisasikan konsep MBM kepada setiap unsur sekolah (guru, siswa, wakil kepala sekolah, guru BK, karyawan, orang tua siswa, pengawas, pejabat dinas pendidikan kabupaten/ kota, pejabat dinas pendidikan provinsi dsb) melalui berbagai mekanisme misalnya seminar, lokakarya, diskusi, rapat kerja, simposium, forum ilmiah dan media massa.

2) Memperbanyak mitra sekolah/madrasah

Sekolah harus memperbanyak mitra baik dari dalam maupun luar sekolah guna terciptanya kesuksesan MBM. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan dapat ditempuh melalui: 1) membuat pedoman

²⁵ Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 68-74.

mengenai tata cara kemitraan, menyediakan sarana kemitraan dan saluran komunikasi, 2) melakukan advokasi, publikasi dan transparansi terhadap pelaksana kepentingan dan 3) melibatkan pelaksana kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yurisdiksi dan kompetensi serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai.

- 3) Merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah serta kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah

Pergeseran dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah memerlukan peninjauan kembali terhadap aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan bertindak dan hubungan antar unsur-unsur sekolah agar sesuai dengan tuntutan MBM.

- 4) Menerapkan prinsip-prinsip MBM yang baik

Prinsip-prinsip MBM yang baik pada dasarnya menganut prinsip-prinsip tata pengelolaan atau tata pemerintahan yang baik yang meliputi partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi serta kepastian jaminan hukum.

- 5) Mengklasifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah

Fungsi-fungsi manajemen secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengawasan/pengontrolan. Aspek-aspek pendidikan antara lain meliputi kurikulum, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kesiswaan, keuangan, penilaian, hubungan sekolah dan masyarakat,

pendidikan lingkungan hidup, penanggulangan narkoba, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek manajemen pendidikan tersebut perlu diklarifikasi secara bersama-sama antara sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/ kota melalui pertemuan/ forum untuk menemukan pembagian urusan-urusan tentang fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek manajemen yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/ kota, termasuk komite sekolah dan dewan pendidikan.

6) Meningkatkan kapasitas sekolah

Peningkatan kapasitas (kemampuan dan kesanggupan) bagi para pelaksana kepentingan pendidikan sekolah perlu dilakukan melalui berbagai upaya, misalnya pemberian panduan tentang konsep, pelaksanaan dan evaluasi MBM, pelatihan, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, seminar tentang praktik-praktik MBM yang baik dan pelajaran yang dapat dipetik oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan MBM serta studi banding ke sekolah yang sukses melaksanakan MBM.

7) Meredistribusi kewenangan dan tanggung jawab

Dalam MBM, kewenangan dan tanggung jawab tidak lagi semata-mata terpusat pada kepala sekolah, tetapi disebar/ didistribusikan kepada para pelaksana kepentingan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis.

- 8) Menyusun rencana pengembangan sekolah, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya.

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), madrasah dituntut buat secara mandiri menggali serta mengalokasikan sumber energi, memastikan prioritas, mengatur, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber energi tersebut kepada warga serta pemerintah. Keberhasilan MBM bisa diukur dari 5 indikator, ialah: 1) Kemandirian madrasah yang kokoh 2) Kemitraan madrasah yang efisien; 3) Partisipasi yang aktif dari warga; 4) Keterbukaan yang bertanggung jawab serta meluas dari pihak madrasah serta warga; serta 5) Akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan oleh madrasah.²⁶

Untuk mempraktikkan MBM, butuh diadakan pelatihan untuk pihak-pihak terpaut tentang dinamika kelompok, metode membongkar permasalahan, membuat keputusan, komunikasi interpersonal, metode presentasi, serta manajemen konflik. Empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MBM adalah:

- 1) Kekuasaan yang dimiliki sekolah. Tingkatan kekuasaan yang dipunyai sekolah bergantung pada gimana MBM mempraktikkan pendelegasian kekuasaan secara merata. Proses ini membutuhkan transisi dari manajemen yang terpusat serta tidak bisa dicoba secara langsung.

²⁶ Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara 2009. h.629

- 2) Pengetahuan serta keahlian sekolah, Masyarakat sekolah butuh mempunyai pengetahuan buat tingkatkan prestasi serta menguasai dan mempraktikkan bermacam metode. Buat itu, sekolah wajib mempunyai sistem pengembangan sumber energi manusia yang baik
- 3) Sistem data, Data yang jelas sangat berarti buat monitoring, penilaian, serta akuntabilitas sekolah. Sekolah wajib mempunyai data yang relevan tentang keahlian guru, partisipan didik, dan visi serta misi sekolah.
- 4) Sistem penghargaan, Sekolah yang mempraktikkan MBM butuh meningkatkan sistem penghargaan untuk masyarakat sekolah yang berprestasi buat menunjang pengembangan karir mereka. Sistem penghargaan ini wajib sepadan, adil, serta transparan.²⁷

5. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Manajemen Berbasis

Madrasah

Hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan Manajemen Berbasis

Madrasah :

- a. Kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBM

Sebagian orang tidak menginginkan tugas bonus di luar pekerjaan mereka dikala ini. Mereka merasa kalau pelaksanaan MBM cuma hendak menaikkan beban kerja. Sekolah hendak menghabiskan lebih banyak waktu buat mengendalikan perencanaan serta anggaran, sehingga kurang

²⁷ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 56.

mempunyai waktu buat memikirkan aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak hanya itu, tidak seluruh guru bersedia ikut serta dalam proses penataan anggaran.

b. Tidak efisien

Pengambilan keputusan dalam sistem kerja MBM dicoba secara partisipatif, yang kerap kali menimbulkan frustrasi serta memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan tata cara yang sentralistik.

c. Memerlukan pelatihan khusus

Sebagian dari pihak- pihak sekolah yang ikut serta dalam MBM belum mempunyai pengalaman dalam mempraktikkan model MBM ini. Kebanyakan dari mereka pula tidak mempunyai kemampuan serta keahlian yang lumayan terpaut dengan esensi sesungguhnya dari MBM serta gimana metode mengelolanya.

d. Kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBM

Pihak sekolah yang lebih dahulu tidak sering di dengar dengan model MBM bisa jadi hendak merasa kaget serta bimbang dengan sistemnya. Ini dapat memunculkan keraguan dalam mengambil tanggung jawab pengambilan keputusan. Dengan demikian, pelaksanaan MBM bisa mengganti kedudukan dan tanggung jawab pihak- pihak yang ikut serta.

e. Kesulitan koordinasi

Sistem kerja MBM yang mengaitkan partisipasi mewajibkan koordinasi yang efektif serta efisien. Oleh sebab itu, dibutuhkan

koordinasi antara bermacam pihak yang ikut serta buat bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka tiap- tiap. 2 perihal yang sangat berarti merupakan pelatihan tentang konsep MBM serta uraian menimpa kedudukan, tanggung jawab, serta hasil yang diharapkan dari seluruh pihak yang ikut serta.

f. Kepala sekolah kurang memahami penerapan MBM

Perihal ini terjalin sebab kepala madrasah umumnya telah terbiasa dengan pola manajemen lama yang cenderung sentralistis. Tidak hanya itu, tenaga pendidik bisa jadi belum seluruhnya menguasai gimana menyelaraskan MBM dengan proses pendidikan di madrasah. Sebagian kepala madrasah bisa jadi cuma membentuk komite sekolah namun masih mengatur pengelolaannya secara penuh.²⁸

Berikut merupakan pemecahan-pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi MBM:

- a. Tingkatkan kualitas SDM serta profesionalitas kepala madrasah, guru, serta pengawas dengan mengaitkan stakeholder dalam bermacam pelatihan di madrasah.
- b. Mengadakan penyuluhan tentang keadaan pembelajaran orangtua siswa serta warga, keahlian dalam membiayai pembelajaran, dan tingkatan apresiasi dalam mendesak anak buat terus belajar.

²⁸ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), h. 38.

- c. Memperoleh sokongan penuh dari pemerintah, tercantum alokasi dana serta pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah, paling utama untuk sekolah yang belum siap secara finansial maupun komunitasnya.
- d. Mendesak siswa buat tingkatan metode belajar supaya lebih efisien serta efektif.
- e. Mempersiapkan instrumen pengukuran kinerja yang transparan serta menguasai penanda keberhasilan yang disepakati oleh seluruh pihak.
- f. Melaksanakan pertemuan buat meningkatkan rencana aktivitas, mengevaluasi aktivitas, serta mengevaluasi hasilnya.
- g. Melaksanakan pertemuan buat meningkatkan rencana aktivitas, mengevaluasi aktivitas, serta mengevaluasi hasilnya.²⁹

6. Strategi Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah

Implementasi MBM hendak sukses lewat strategi-strategi berikut ini, adalah: Sekolah butuh diberikan otonomi dalam sebagian aspek. Pertama, memberikan hak otonomi terpaut kekuasaan serta kewenangan, dan mendesak pengembangan pengetahuan serta keahlian secara berkepanjangan. Tidak hanya itu, berarti pula buat membagikan akses data yang komprehensif serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sukses. Kedua, mengaitkan aktif warga dalam perihal pembiayaan dan proses pengambilan keputusan terpaut kurikulum serta aspek instruksional serta non-instruksional.

²⁹ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), h. 40.

Ketiga, kepemimpinan madrasah yang kokoh supaya sanggup menggerakkan serta menggunakan sumber energi sekolah secara efisien, paling utama dengan kepala madrasah jadi sumber inspirasi dalam pembangunan serta pengembangan madrasah secara merata. Kepala madrasah dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) mempunyai kedudukan selaku perancang, motivator, fasilitator, serta penghubung.

Keempat, Ada proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan, kepala madrasah wajib menghasilkan hawa demokratis serta mencermati aspirasi dari dasar. Kelima, Seluruh pihak wajib menguasai kedudukan serta tanggung jawabnya dengan serius. Keenam, Terdapatnya pedoman dari Kementerian Pembelajaran yang bisa mendesak proses pembelajaran di madrasah jadi lebih efektif serta efisien. Ketujuh, Madrasah wajib menampilkan transparansi serta akuntabilitas minimum dengan menyusun laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya. Kedelapan, Implementasi MBM wajib bertujuan buat tingkatkan kinerja sekolah, paling utama dalam tingkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan, Implementasi diawali dengan sosialisasi konsep MBM, identifikasi kedudukan tiap- tiap pihak, pengembangan kelembagaan (capacity building), pelatihan terhadap kedudukan baru, implementasi dalam proses pendidikan, penilaian penerapan di lapangan, serta revisi yang dibutuhkan.³⁰

³⁰ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 159.

Pendapat lain mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur pokok yang jadi prasyarat minimal untuk MBM, adalah: partisipasi warga, tenaga kerja, keuangan, kurikulum, fasilitas serta prasarana, dan strategi penerapan. Oleh sebab itu, strategi Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) hendak berkaitan dengan keadaan objektif yang terdapat di sekolah serta dengan para pemangku kepentingan. Ini menantang kepala sekolah serta guru selaku tiang-tiang sekolah buat berperan dengan kreatif. Tidak hanya itu, guru serta kepala sekolah wajib terus tingkatkan profesionalitas mereka sehingga bisa menggunakan seluruh sumber energi secara maksimal.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melaporkan kalau MBM tidak cuma bertujuan buat tingkatkan kualitas pembelajaran, namun pula buatenuhi Standar Nasional Pembelajaran (SNP). Perihal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 19 Tahun 2005 tentang SNP, Pasal 49, ayat (1), yang melaporkan kalau "pengelolaan satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran bawah serta menengah wajib mempraktikkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan lewat kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, serta akuntabilitas".

B. Akreditasi Madrasah

1. Pengertian Akreditasi Madrasah

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan

peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.³¹

Akreditasi merupakan evaluasi yang dicoba oleh pemerintah terhadap sekolah, baik negara ataupun swasta, buat memastikan tingkatan pengakuan pemerintah terhadap mutu pembelajaran yang diselenggarakan.³² Tetapi, kebijakan ini saat ini diterapkan secara merata terhadap segala sekolah, baik negara ataupun swasta.

Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkupnya meliputi: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3); standar proses (4) standar penilaian pendidikan; (5) standar tenaga

³¹ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan madrasah Tahun 2023*.(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.1

³² Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), h. 256

kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pembiayaan.

Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu. Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.³³

2. Landasan Hukum Akreditasi

Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³⁴

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

³³ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.2

³⁴ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.3

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
 - h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama.

- 
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- n) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- o) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib.

- p) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- q) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- r) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- s) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- t) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- u) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- v) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

- w) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- x) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- y) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- z) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- aa) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- bb) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- cc) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- dd) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah.

ee) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

ff) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

gg) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57/P/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Anggota BANS/M dan BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun 2018-2022 dan sebagaimana telah diubah Kembali dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 529/P/2022 tentang Perpanjangan Masa BAKTI Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal periode 2018-2022.

hh) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan non formal periode 2018-2022.

ii) Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 395/p/2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi satuan pendidikan kerja sama; 38. Keputusan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 209/P/2021 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Fungsi dan Tujuan Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁵

- a) Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
- b) Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

³⁵ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.9

- c) Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk:³⁶

- a) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan
- b) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan
- c) Memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan
- d) Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dalam buku pedoman akreditasi madrasah swasta, tujuan akreditasi merupakan selaku berikut:

- a) Memperoleh data yang bisa digunakan buat perencanaan pemberian dorongan dalam pembinaan sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- b) Mendesak serta melindungi supaya kualitas pembelajaran cocok dengan kurikulum yang berlaku.
- c) Mendesak serta melindungi kualitas tenaga kependidikan.
- d) Mendesak tersedianya sarana pembelajaran yang baik.
- e) Mendesak serta melindungi ketahanan sekolah dalam pengembangan selaku pusat kebudayaan.

³⁶ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.7

- f) Melindungi warga dari praktek pembelajaran yang tidak bertanggung jawab.
- g) membagikan data kepada warga tentang kualitas pembelajaran sekolah/ madrasah.
- h) Mempermudah pengaturan perpindahan siswa dari satu madrasah ke madrasah yang lain.³⁷

4. Manfaat Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai:³⁸

- a) Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah
- b) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah
- c) Motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, berencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; dan
- d) Informasi dan rekomendasi Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan, ...*, h. 260-261

³⁸ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.8

Dengan demikian, bagi Pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat

keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.³⁹

5. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

Peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen pemerintah yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan peraturan tersebut arah dan parameter peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan menjadi lebih terarah dan lebih bisa dikelola secara sistematis.

Salah satu hal yang tercantum dalam peraturan pemerintah itu adalah kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu (Pasal 92 ayat 3 dan 4). Badan Akreditasi Nasional (BAN) memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 92 ayat 5).

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis

³⁹Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan* (Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.9

pendidikan. Karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan. Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing. Sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi penting untuk memantau dan memastikan setiap jenjang satuan pendidikan diselenggarakan sesuai standar mutu pendidikan. Sebuah satuan pendidikan dikatakan memiliki tingkat mutu tertentu jika telah melewati proses audit oleh lembaga penjaminan mutu (internal dan eksternal).

Akreditasi sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-S/M pada akhirnya akan memberikan status akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan penilaian akhir asesor. Menurut Permendikbud No.13 tahun 2018 pasal 18 ayat 1, status akreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Pada ayat 2 disebutkan peringkat akreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi A (unggul), terakreditasi B (baik) dan terakreditasi C (cukup).⁴⁰ Adapun pada ayat 6 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang dinyatakan tidak

⁴⁰ Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan*(Jakarta Selatan: BAN-S/M, 2023), h.23

terakreditasi diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.

Setiap hasil akreditasi akan memberikan rekomendasi terhadap satuan pendidikan, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Idealnya rekomendasi hasil akreditasi disusun secara lengkap dan komprehensif berdasarkan data/fakta di lapangan saat asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah. Itu pula yang menjadikan rekomendasi hasil akreditasi yang dibuat oleh asesor berdasarkan data hasil visitasi ke sekolah/madrasah, lalu diolah oleh BAN-S/M provinsi menjadi sebuah rekomendasi yang utuh, menjadi penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan tersusunnya rekomendasi akreditasi yang berkualitas dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perbaikan serta peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan selaku panduan dalam memperhitungkan apakah partisipan didik sudah mencapai tingkatan kompetensi yang dibutuhkan buat lulus dari suatu satuan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan mencakup kompetensi yang wajib dipahami oleh partisipan didik dalam segala mata pelajaran ataupun kelompok mata pelajaran, dan mata kuliah ataupun kelompok mata kuliah tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) buat Satuan

Pembelajaran Awal serta Menengah, Pasal 1 ayat (1) serta (2) melaporkan kalau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) buat satuan pembelajaran awalserta menengah digunakan selaku panduan dalam memperhitungkan apakah partisipan didik layak buat lulus. SKL tersebut mencakup standar kompetensi lulusan minimal buat satuan pembelajaran bawah serta menengah, standar kompetensi lulusan minimal buat kelompok mata pelajaran, dan kompetensi lulusan minimum buat tiap mata pelajaran.⁴¹

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pembelajaran merupakan serangkaian kualifikasi keahlian yang mencakup pengetahuan, keahlian, serta perilaku yang diresmikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 23 Tahun 2006. SKL ini digunakan selaku panduan dalam memperhitungkan apakah partisipan didik penuhi ketentuan buat lulus dari satuan pembelajaran..

C. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah suatu upaya pembaruan untuk meningkatkan mutu serta demokratisasi dalam dunia pembelajaran. Tetapi, dalam mengimplementasikan MBM, ada sebagian aspek berarti yang butuh dicermati:

- 1) Kekuasaan dalam pengambilan keputusan: Dalam MBM, madrasah/sekolah butuh mempunyai kekuasaan yang lebih besar, paling

⁴¹ Mulyasa, *Manajemen Kurikulum Merdeka* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2023), hal.19

utama untuk kepala sekolah, buat mengambil keputusan yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang di idamkan.

- 2) Pengetahuan serta keahlian: Madrasah/sekolah wajib mempunyai sistem pengembangan tenaga pendidik yang efisien, yang mencakup pelatihan serta pengembangan keahlian untuk seluruh pihak terkait.
- 3) Sistem data yang transparan: Madrasah/sekolah yang mempraktikkan MBM butuh mempunyai sistem data yang jelas serta transparan tentang program pembelajaran yang diselenggarakan. Perihal ini berarti supaya warga bisa mengenali keadaan madrasah/sekolah dengan baik.
- 4) Sistem penghargaan: Dalam MBM, butuh disusun sistem penghargaan untuk masyarakat madrasah/sekolah yang berprestasi. Perihal ini diharapkan bisa tingkatkan motivasi serta produktivitas segala anggota madrasah/ sekolah.

Oleh sebab itu, kewenangan dalam pengelolaan madrasah, sistem pengembangan sumber energi manusia, transparansi, dan pemberian penghargaan untuk yang berprestasi jadi kunci berarti dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah dengan efisien serta efektif.

Penerapan MBM merupakan suatu proses yang selalu serta mengaitkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di madrasah. Oleh sebab itu, strategi kunci yang butuh diambil dalam implementasi MBM merupakan selaku berikut:

- 1) Mengedukasi tentang konsep MBM kepada seluruh pihak terpaut.
- 2) Melaksanakan analisis suasana secara merata.

- 3) Menetapkan tujuan yang cocok dengan keadaan di lapangan.
- 4) Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang butuh ikut serta dalam menggapai tujuan dan memperhitungkan tingkat kesiapannya.
- 5) Memperhitungkan kesiapan tiap guna serta faktornya lewat analisis SWOT.
- 6) Memilah strategi buat menanggulangi permasalahan ataupun tantangan yang dialami.
- 7) Merancang aksi buat jangka waktu pendek, menengah, serta panjang.
- 8) Melakukan program-program buat mewujudkan rencana manajemen berbasis madrasah dalam jangka pendek.⁴²

Dengan demikian, pelaksanaan MBM sangat berguna untuk sekolah, paling utama dalam menunjang proses akreditasi sekolah. Tetapi, keberhasilan implementasi ini hendak terjalin secara efisien serta efektif bila didukung oleh sumber energi manusia yang handal buat mengelola madrasah, alokasi dana yang mencukupi buat mengendalikan staf cocok dengan gunanya, sarana yang mencukupi buat menunjang aktivitas pendidikan, dan sokongan besar dari warga, tercantum orang tua siswa.

⁴² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), h.26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan informasi di lapangan buat dianalisis serta menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Dalam skripsi ini, ulasan memakai tata cara deskriptif kualitatif, yang berfokus pada riset sesuatu keadaan, pemikiran, ataupun peristiwa pada dikala ini buat membuat cerminan yang sistematis, faktual, serta akurat menimpa fakta- fakta, sifat- sifat, dan ikatan antara fenomena yang diselidiki. Tipe riset yang digunakan dalam proposal ini merupakan riset kualitatif.

Sugiono berpendapat, riset kualitatif merupakan riset yang menginvestigasi keadaan objek yang bertabiat natural, dimana periset berfungsi selaku instrumen kunci. Metode pengumpulan informasi dicoba secara triangulasi, serta analisis informasi bertabiat induktif. Hasil dari riset kualitatif lebih menekankan pada arti serta generalisasi.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Posisi riset merupakan tempat di mana peneliti melaksanakan riset. Dalam riset ini, posisi yang diseleksi merupakan MAS Misbahul Ulum di Jl. Tgk Chiek Di Paloh Muara Satu Kota Lhokseumawe. Pemilihan posisi ini didasarkan pada keunikan serta energi tarik data-data yang ada buat diteliti. Sebagian di antara lain tercantum reputasi MAS Misbahul Ulum selaku sekolah swasta kesukaan, sebab

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

keberhasilannya dalam meningkatkan mutu layanan serta pembelajaran. Tidak hanya itu, lembaga ini terus meningkatkan penerapan manajemen berbasis sekolah dengan mengaitkan partisipasi dari segala masyarakat sekolah, yayasan, serta komite sekolah. Prestasi serta kualitas yang besar pula jadi ciri yang menonjol dari lembaga ini.

Bersumber pada sebagian penemuan dini yang diperoleh, periset merumuskan kalau MAS Misbahul Ulum di Kota Lhokseumawe sudah sukses mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik. Perihal ini teruji dari keahlian sekolah dalam melaksanakan proses secara mandiri, yang tercermin dari pencapaian prestasi siswa. Tidak hanya itu, partisipasi aktif warga dalam meningkatkan muatan pelajaran yang berbeda dari kurikulum yang sudah diresmikan pemerintah pula jadi penanda keberhasilan. Tidak hanya itu, sekolah ini pula sukses kurangi kasus yang terdapat. Mengamati keunggulan serta kasus yang ditemui, periset merasa sangat tertarik serta bergairah buat menyelidiki lebih lanjut tentang fenomena implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang terjalin di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.

C. Subjek Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi serta data yang akurat menimpa implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe, periset sudah mengenali pihak- pihak yang hendak jadi subjek riset. Ini terdiri dari 2 kelompok utama: key informan serta informan. Key informan merupakan orang yang mempunyai uraian mendalam serta pengalaman signifikan dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di sekolah tersebut. Sedangkan

informan merupakan orang lain yang pula ikut serta dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut tetapi bisa jadi mempunyai uraian yang lebih universal. Kedua kelompok ini hendak membagikan donasi berharga dalam membagikan cerminan lengkap tentang penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam riset ini, instrumen utamanya merupakan peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara serta observasi selaku instrumen pendukung. Periset berupaya buat meminimalkan pengaruh subjektif serta menghasilkan area yang natural supaya proses riset bisa berjalan cocok dengan keadaan sesungguhnya. Fokus utama riset merupakan keterlibatan langsung peneliti di lapangan dengan para informan serta sumber informasi. Peneliti hendak melindungi ikatan harmonis serta terbuka dengan stakeholder buat membenarkan komunikasi yang mudah serta transparan tanpa terdapat rasa curiga, sehingga data bisa dipertukarkan secara terbuka serta tanpa hambatan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam riset ini, metode pengumpulan informasi yang hendak digunakan antara lain:

1. Observasi

Periset hendak melaksanakan observasi terhadap perencanaan manajemen berbasis madrasah. Objek yang diamati meliputi sebagian aspek, semacam manajemen pengembangan kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen fasilitas serta prasarana,

manajemen keuangan, manajemen partisipasi warga, serta manajemen bidang pelayanan spesial pembelajaran.

Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan aksi pengamatan serta pencatatan yang dicoba secara sistematis terhadap tanda- tanda yang lagi diteliti. Metode observasi merujuk pada tata cara pengamatan serta pencatatan yang dicoba secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang lagi diselidiki. Secara lebih luas, observasi tidak cuma terbatas pada pengamatan yang dicoba secara langsung, namun pula bisa mencakup pengamatan yang tidak langsung.⁴⁴

Menurut Sutrisno Hadi, tata cara observasi bisa dimaksud selaku aksi pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang lagi diselidiki. Observasi adalah tata cara pengumpulan informasi di mana periset ataupun kolaboratornya mencatat data sebagaimana yang mereka lihat langsung sepanjang riset. Dengan demikian, tata cara observasi merujuk pada metode pengambilan informasi lewat pengamatan langsung terhadap suasana ataupun peristiwa yang terjalin di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi di mana proses tanya jawab lisan berlangsung satu arah, di mana persoalan diajukan oleh pihak yang melaksanakan wawancara serta jawaban diberikan oleh

⁴⁴ Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:LP3ES,1995), h.46.

informan. Menurut Hopkins, wawancara merupakan sesuatu metode buat menguasai suasana tertentu di dalam kelas dari perspektif yang berbeda.⁴⁵

Dalam wawancara, terjalin komunikasi langsung antara periset serta responden dalam wujud tanya jawab, yang terjalin dalam pertemuan tatap muka, sehingga ekspresi serta gerak badan informan jadi bonus dalam menghantarkan data secara verbal.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam melaksanakan wawancara cuma mencakup garis-garis besar kasus yang hendak ditanyakan. Tujuannya merupakan buat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang penerapan manajemen berbasis sekolah dan mengaitkan komponen-komponen yang terdapat dalam MBM secara lebih rinci.

3. Dokumentasi

Tata cara ini adalah metode pengumpulan informasi yang memakai modul tertulis maupun tercatat, semacam yang dipaparkan oleh Sanapiah Faisal, yang diucap tata cara dokumenter. Sumber datanya berbentuk bahan-bahan tertulis maupun catatan. Dalam tata cara ini, petugas pengumpulan informasi cuma butuh mentransfer data dari bahan tertulis yang relevan ke lembaran yang disediakan. Dokumentasi pula ialah metode pengumpulan informasi dengan menekuni catatan-catatan yang menimpa informasi individu responden.⁴⁶

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi ...* (Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Revisi, 2002), h. 157

⁴⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112

Dengan memakai tata cara ini, periset bisa meninjau informasi yang mencakup komponen manajemen berbasis sekolah yang terdapat di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe. Bersumber pada informasi tersebut, periset bisa mengenali gimana penerapan manajemen berbasis sekolah di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe. Hasil dari riset dokumen ini jadi penguat untuk hasil pengumpulan informasi lewat observasi serta wawancara yang sudah dicoba lebih dahulu.

F. Analisis Data

Bersumber pada informasi yang terhimpun untuk merespons kasus yang diformulasikan dalam riset ini, analisis informasi dicoba terhadap data kualitatif yang diperoleh dari penerapan Manajemen Berbasis Madrasah dalam mencapai visi serta misi sekolah di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan informasi merupakan langkah- langkah yang terstruktur serta standar buat memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam riset ini, informasi dikumpulkan lewat observasi, wawancara, serta riset dokumentasi. Sehabis informasi terkumpul, data tersebut disajikan dalam wujud deskripsi hasil observasi, transkrip wawancara, serta deskripsi dari dokumen- dokumen yang diselidiki.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi informasi merupakan proses di mana informasi mentah yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, serta dokumentasi diklasifikasikan serta diringkas supaya lebih gampang dimengerti. Tujuan dari reduksi informasi

ini merupakan buat menyaring, memilah, serta mengorganisir informasi dengan teliti sehingga kesimpulan akhir dari riset bisa disusun serta diverifikasi.⁴⁷

Dalam riset ini, informasi menimpa komponen manajemen berbasis madrasah di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe sudah direduksi supaya cocok dengan keadaan yang sesungguhnya.

3. Display Data

Menurut Miles and Huberman, penyajian informasi dalam riset kualitatif kerap dicoba lewat bacaan naratif. Dengan memakai pendekatan ini, pembaca bisa menguasai konteks informasi serta melaksanakan analisis lebih lanjut. Informasi yang sudah direduksi setelah itu diorganisir sesuai dengan tema ataupun fokus riset buat membagikan data yang jelas serta gampang dimengerti. Informasi yang sudah disusun bersumber pada rumusan permasalahan riset setelah itu disajikan dalam wujud narasi yang cocok dengan tujuan riset, ialah menimpa implementasi manajemen berbasis sekolah dalam mempertahankan akreditasi madrasah.

ANALISIS SWOT	
Strengths	Weaknesses
1. Melakukan sosialisasi MBM yang dilakukan setiap bulannya	1. Kurangnya bentuk kerjasama antara madrasah dengan masyarakat
2. Memperbanyak mitra sekolah/madrasah, yang dibentuk dengan pihak lembaga pendidikan dari Kankemenag dan Kemendigbud dan melakukan kerjasama dengan pihak keamanan seperti Brimob, TNI dan Polisi	

⁴⁷ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) hlm.17.

3. Merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah serta kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah/madrasah	
4. Menerapkan prinsip-prinsip MBM yang baik meliputi partisipasi, transparansi, tanggungjawab, akuntabilitas, wawasan kedepan, prediktif, demokrasi, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi.	
5. Mengklasifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah/madrasah	
6. Meningkatkan kapasitas sekolah/madrasah	
7. Mendistribusi kewenangan dan tanggungjawab	
8. Menyusun rencana pengembangan sekolah, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya.	

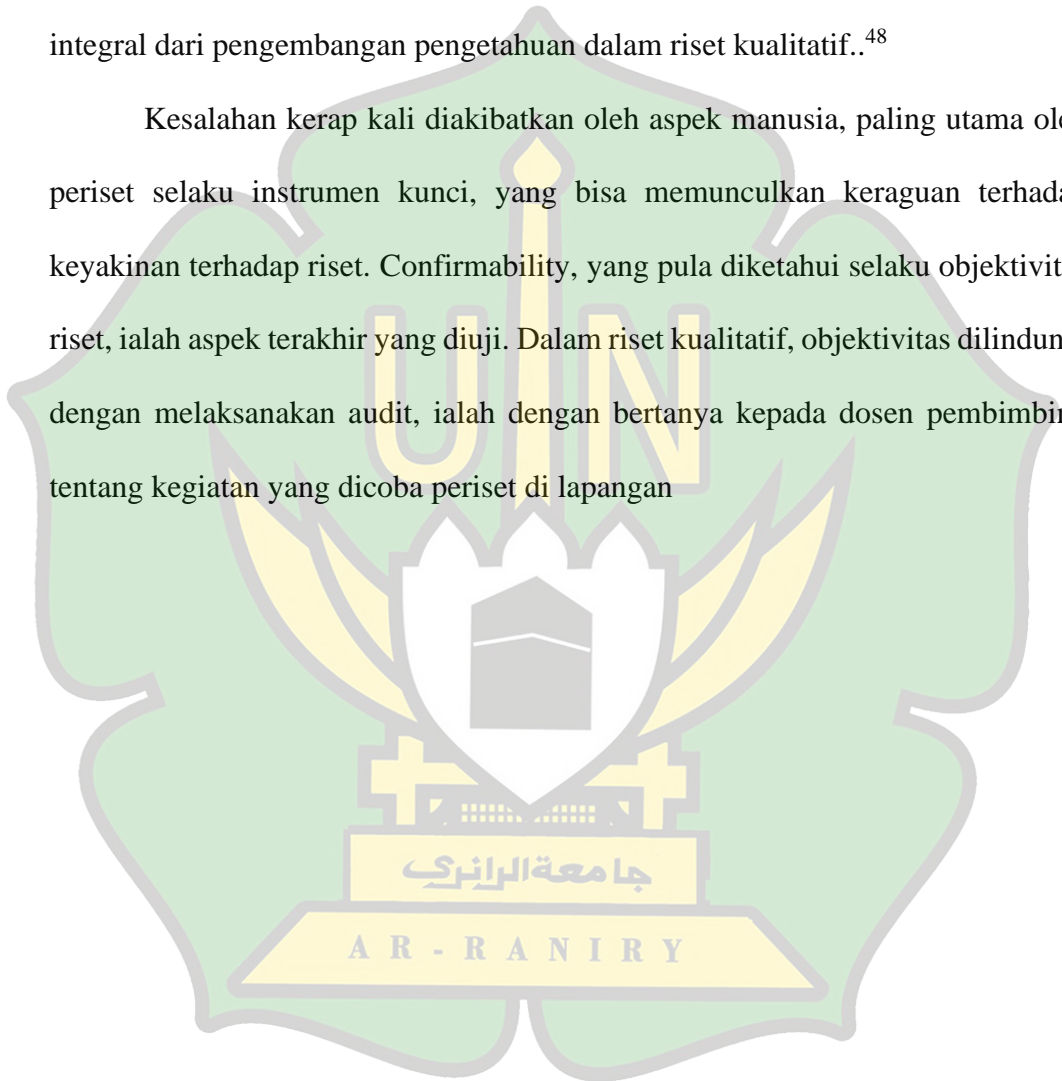
G. Uji Keabsahan Data

Dalam riset ini triangulasi ialah gabungan ataupun campuran bermacam tata cara yang dipakai buat menguji fenomena yang silih terpaut dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Dalam perihal ini periset menetapkan uji coba keabsahan informasi berbentuk uji credibility, transferability, dependability,

serta confirmability, uji credibility dalam riset ini digunakan buat mengenali riset ini bisa dipercaya ataupun tidak.

Pengecekan terhadap keabsahan informasi tidak cuma bertujuan buat menjawab kritik terhadap keilmiahan riset kualitatif, namun pula selaku bagian integral dari pengembangan pengetahuan dalam riset kualitatif..⁴⁸

Kesalahan kerap kali diakibatkan oleh aspek manusia, paling utama oleh periset selaku instrumen kunci, yang bisa memunculkan keraguan terhadap keyakinan terhadap riset. Confirmability, yang pula diketahui selaku objektivitas riset, ialah aspek terakhir yang diuji. Dalam riset kualitatif, objektivitas dilindungi dengan melaksanakan audit, ialah dengan bertanya kepada dosen pembimbing tentang kegiatan yang dicoba periset di lapangan



⁴⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.320.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe pada hari Rabu 05 Juni 2024 s/d hari Sabtu 08 Juni 2024 Juni 2024. Berikut hasil penelitian sebagai berikut:

a. Sejarah Singkat MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe

Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang seratus persen berpendudukan muslim, bangkit dari ketertinggalan, dengan cita-cita membangun sebuah lembaga pendidikan untuk generasi penerus. Beberapa tokoh yang menjadikan masjid Taqwa Paloh sebagai pusat aktivitas keagamaan, mendirikan satu dayah/pesantren yang diberi nama Nurul-Muhtadi pada tahun 1987, yang terletak dibagian timur masjid Taqwa Paloh, yang bercorak salafi, dengan konsentrasi penuh pada kurikulum dayah salafi. Dayah tersebut mengasuh santri putra dan santri putri dan tetap berjalan hingga sekarang yang diasuh oleh beberapa orang Teungku.

Belum puas dengan langkah pertama ini, beberapa tokoh yang peduli terhadap kepentingan ilmu pengetahuan, sepakat untuk melahirkan satu lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah Aliyah (MA). Cita-cita itu menjadi kenyataan yang didukung oleh tokoh sentralnya, Tgk. H. M. Thaib Mahmud bersama tokoh-tokoh masyarakat Paloh lainnya. sejak saat itu dibentuk panitia atau badan pengelola MA dalam upaya mendorong percepatan pembangunan awal. Tahun 1989, usaha yang telah dirintis itu, benar-benar menjadi nyata,

MA itu lahir dan diresmikan oleh pihak Kantor Departemen (Kementerian) Agama Kota Lhokseumawe bersama Kepala MA Misbahul Ulum dan masyarakat Paloh secara sederhana, dengan kondisi bangunan semi-permanen, yang terletak di samping Masjid At-Taqwa Paloh.

Memang, hambatan pertama yang dihadapi saat itu adalah lambatnya proses pembangunan disebabkan karena minimnya dana yang tersedia. Para tokoh dan panitia yang telah terbentuk berusaha untuk mewujudkan bangunan dengan cara mencari bantuan dari PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Mobil Oil dan instansi lainnya. meski dengan bangunan sederhana namun proses pengajaran MA sudah terlaksana, dengan murid-murid berasal dari desa Meuria Paloh dan sekitarnya.

Badan pengelolaan MA pada saat itu belum bernama Yayasan dan belum memiliki badan hukum tetap. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat kemukiman Paloh, terutama yang aktif dalam badan pengelola sepakat untuk mendirikan sebuah Yayasan dengan nama Yayasan Misbahul Ulum (YMU) pada tanggal 3 Januari 1990. Atas dasar itu maka terbentuklah pengurus YMU. YMU yang sudah terbentuk itu menyepakati untuk mendirikan Madrasah Aliyah Misbahul Ulum. (MA MU) Paloh pada tahun 1992 di samping MTs yang sudah berdiri sebelumnya.

Baik MTs maupun MA Misbahul Ulum, menggunakan kurikulum Pemerintah dan bersistem non-asrama. Kedua tingkat Madrasah tersebut sudah memiliki gedung belajar sendiri yang terletak berdekatan dengan Kampus Pesantren Modern Misbahul Ulum.

b. Data Umum Madrasah

Nomor Statistik Madrasah	: 131211730001
NPSN	: 10113786
Nama Madrasah	: MA Misbahul Ulum
Status Madrasah	: Swasta
Waktu Madrasah	: Pagi
Kategori Madrasah	: Madrasah Reguler
NPWP	: 00.484.979.0-102.000
Jalan	: Jalan Tgk. Chik Di Paloh
Provinsi	: Aceh
Kabupaten	: Kota Lhokseumawe
Kecamatan	: Muara Satu
Kelurahan	: Meunasah Dayah
Kode Pos	: 24353
Latitude	: 5.2000755
Longitude	: 97.08587
Website dan Email	: ma_misbahululum89@yahoo.com

1. Jarak Madrasah

Jarak ke Kemenag Provinsi	: >50 Km
Jarak ke Kemenag Kabupaten	: 11-30 Km
Jarak ke MTs Terdekat	: <1 Km
Jarak ke SMP Terdekat	: 1-2 Km
Jarak ke MA Terdekat	: 10 Km

Jarak ke SMA Terdekat : 3-5 Km
 Jarak ke PTAI Terdekat : 11-30 Km
 Jarak ke PTU Terdekat : 1-10 Km

2. Dokumen dan Perizinan

No. SK Pendirian : Nomor 4414 Tahun 2018
 Tanggal SK Pendirian : 28 Agustus 2018
 Kepemilikan ISO : Belum
 Status Akreditasi : A
 Nomor SK Akreditasi : 746/BAN-SM/SK/2019
 Tanggal SK Akreditasi : 09 September 2019
 Tanggal Berakhir Akreditasi : 09 September 2024
 Nilai Akreditasi Terakhir : 92 (Sembilan Puluh Dua)

3. Kepala Sekolah dan BOS

Nama Lengkap : Hasballah, S.Pd.I, M.Pd
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Kepegawaian : Non PNS
 Pendidikan Terakhir : S2
 Status Sertifikasi : Sudah
 NIP : -
 Nomor Telepon : 0813 7607 3159
 Status Menerima BOS : Ya
 Nama Bendahara : Mansur, S.Pd.I

Nomor Rekening : 7151806648 a/n MAS

Misbahul Ulum

Nama Bank : BSI KC Lhokseumawe

4. Keadaan Guru dan Pegawai

Guru Tetap/PNS : 1

Guru Tidak Tetap : 39

Pegawai Tidak Tetap : 6

Penjaga Sekolah : 1

5. Keadaan Siswa/i

Tahun Ajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
2019/2020	124	135	95	123	77	95	649
2020/2021	104	137	105	121	87	120	674
2021/2022	108	145	90	133	94	120	690
2022/2023	105	137	96	142	87	128	695
2023/2024	82	132	96	137	97	239	683

A R - R Tabel 4.1 Keadaan Siswa

6. Tingkat Kelulusan Siswa MA Misbahul Ulum

Tahun Pelajaran	Pengikut UN	Lulus	Kelulusan
2020/2021	289	289	100%
2021/2022	214	214	100%
2022/2023	215	215	100%

Tabel 4.2 Tingkat Kelulusan Siswa MA Misbahul Ulum

c. Visi Misi Madrasah Aliyah Misbahul Ulum

Mewujudkan generasai islam yang pintar, sholeh dan unggul.

d. Misi Madrasah Aliyah Misbahul Ulum

Mengacu pada visi madrasah diatas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mencetak kader islam yang berakhlak mulia
2. Mencetak kader islam yang beriman dan bertaqwa
3. Mencetak kader islam yang berilmu pengetahuan luas dan berbuat baik
4. Mencetak kader islam yang kreatif dan inovatif
5. Mencetak kader islam yang bertanggung jawab
6. Mengembangkan dan membiasakan perilaku disiplin 6S (senyum, salam, sapa, sopan, santun, sederhana) bagi setiap warga madrasah
7. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung terlaksananya pendidikan yang bermutu sesuai dengan keistimewaan aceh.

e. Tujuan Madrasah Aliyah Misbahul Ulum

Tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Misbahul Ulum dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan serta mengacu pada:

1. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan

2. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
3. Meraih prestasi akademik maupun non akademik
4. Mengembangkan perilaku yang santun, sederhana untuk mendukung terlaksananya pendidikan yang bermutu serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.

B. Hasil Penelitian

Pada kesempatan kali ini peneliti akan menjelaskan hasil dari pada penelitian yang sudah dilaksanakan dari pada permasalahan-permasalahan dan bagaimana solusi yang akan peneliti jelaskan, tentang Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe yang peneliti peroleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan satu orang guru. Adapun hasil dari pada penelitian mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe

Tidak mudah bagi sebuah instansi atau lembaga menerapkan sebuah sistem. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah yang baik dan efisien pasti akan melalui beberapa rintangan dan juga dukungan dari berbagai pihak, baik itu sebuah acuan sebagai motivasi semangat dalam bekerja maupun halang rintang yang dijalani.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah, Wakabid Kurikulum dan juga guru yang bertujuan agar kita mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan bagaimana solusi yang didapatkan oleh madrasah dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pertama peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, dengan pertanyaan pertama ialah: dalam pelaksanaan MBM, apakah bapak masih merasakan kesulitan dalam menerapkan MBM di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?

“Pelaksanaan MBM di MAS Misbahul Ulum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melanjutkan roda pendidikan dengan maksimal dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan menggunakan fasilitas yang ada sebaik dan sesempurna mungkin”.⁴⁹

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kedua, apa strategi yang bapak terapkan untuk memastikan bahwa penerapan MBM memberikan

⁴⁹ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa di madrasah?

“Keutamaan yang pertama adalah kerjasama tim dan terbuka dalam melaksanakan MBM. Seluruh stakeholder di madrasah menjalankan dengan amanah sesuai dengan SK yang telah diberikan dalam memberikan pendidikan kepada siswa/i. Dan juga sesuai dengan Gerakan Disiplin Guru (GDG) dan Gerakan Disiplin Siswa/i di madrasah, sesuai dengan ketetapan maka madrasah atau lembaga yang kita bina akan sesuai seperti yang kita harapkan walaupun nantinya akan ada hambatan-hambatan yang terjadi”.⁵⁰

Pertanyaan selanjutnya ialah, apa langkah konkret yang telah bapak terapkan untuk memastikan bahwa penerapan MBM di madrasah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya? Dan bagaimana bapak mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses ini?

“Setiap permasalahan-permasalahan yang ada pasti akan dicari solusi didalam rapat, tak luput pula menghadirkan wali murid untuk berembuk mendapatkan solusi kemudian juga tidak lupa untuk menyampaikan kepada yayasan bagaimana tanggapan atau solusi lanjutan dari pihak yayasan. Dan dengan jelas pihak madrasah menjalankan sesuai dengan arahan dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan”.⁵¹

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan ialah, apa langkah-langkah yang bapak terapkan upaya mengatasi kurang minatnya dari stakeholder untuk terlibat dalam pengelolaan MBM dalam mempertahankan akreditasi A?

“Setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, oleh karena itu tak bosan-bosan Bapak memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada guru-guru, menanyakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru, dengan cara bertahap diawali dari pada wakabid pengajaran kemudian apabila tidak ada perubahan dialihkan ke kepala sekolah dan

⁵⁰ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁵¹ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

apabila tidak adanya perubahan maka akan ditindak lanjuti oleh yayasan. Semuanya melalui prosedur tidak adanya tindakan sepihak dari kepala sekolah. Melalui nasehat-nasehat dan dengan kesabaran penuh maka insyaallah akan membuahkan hasil yang baik pula”.⁵²

Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah SDM di madrasah sudah memadai dan bekerja dengan baik dibidang masing-masing dalam pelaksanaan MBM di madrasah?

“Hampir keseluruhan SDM di madrasah sudah memadai, banyak guru-guru yang sudah mendapatkan gelar S2, bergelar master dan juga sudah verifikasi dan banyak guru-guru yang sudah PPPK (P3). Dan ada juga yang melanjutkan pendidikan mengambil S3. Dan juga sudah sangat berkompeten dalam mengajar karena sudah mendapatkan sertifikasi”.⁵³

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana bentuk kerjasama dari pada pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait untuk tercapainya pelaksanaan MBM dalam mempertahankan akreditasi A?

“Madrasah selalu memberikan laporan dan meminta saran-saran dan masukan sebagai bahan motivasi untuk meningkat mutu pendidikan dan juga mutu guru. Dan juga sebagai bentuk silaturahmi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan lembaga-lembaga yang terkait”.⁵⁴

Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah madrasah sudah mengadakan penyuluhan mengenai tingkat pendidikan terkait pelaksanaan MBM untuk meluaskan wawasan?

“Setiap tahunnya madrasah rutin mengadakan pelatihan atau penyegaran bertujuan agar guru-guru memiliki semangat muda dalam memberikan pendidikan. Dan madrasah juga mengadakan penyuluhan kepada siswa/i dengan menghadirkan berbagai lembaga seperti dari dinas kesehatan, dinas capil, pihak keamanan daerah atau Brimob untuk

⁵² Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁵³ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁵⁴ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

mengingatkan agar selalu berhati-hati dan tidak bertindak semena-mena di kehidupan bermasyarakat”.⁵⁵

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah ialah, dalam rapat bulanan apakah MBM dijadikan topik utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan MBM di madrasah?

“Setiap rapat bulannya dari pihak madrasah sudah membuat topik pembahasan apa yang akan dibahas pada rapat bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Seperti mengenai kedisiplinan guru, kedisiplinan siswa/i, pembiayaan atau hal lain sebagainya. Dan diakhir dari setiap rapat, apabila memiliki waktu lebih para guru-guru akan membahas hal-hal yang masih belum maksimal terutama mengenai pelaksanaan MBM di madrasah. Didalam rapat juga mengadirkan komite sekolah, wali murid atau yayasan apabila membutuhkan”.⁵⁶

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara bersama Wakabid Kurikulum dan seorang guru.

Pertanyaan pertama peneliti ajukan kepada Wakabid Kurikulum, pertanyaannya ialah apa langkah konkret yang telah ibu ambil untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa penerapan MBM di madrasah sesuai dengan prinsip-prinsip? Dan bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses mempertahankan akreditasi A?

“Kegiatan yang sudah difasilitasi sekolah dan dengan persetujuan kemenag akan dijalankan semaksimal mungkin dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Hambatan-hambatan yang terjadi akan dilakukan musyawarah atau rapat bersama kepala sekolah, komite, masyarakat dan wali

⁵⁵ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁵⁶ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

murid dalam upaya mencari solusi agar penerapan MBM di madrasah tetap berjalan dengan baik”.⁵⁷

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan ialah, apakah segala program MBM telah disusun dengan baik dan transparan dan dipertanggung jawabkan dengan baik pula?

“Semua program MBM telah disusun dengan baik dan transparansi baik dengan lembaga pendidikan maupun masyarakat dan tidak ada yang disembunyikan”.⁵⁸

Terakhir peneliti mewawancarai seorang guru, dengan pertanyaan pertama ialah, apa langkah yang bapak ambil untuk memastikan bahwa kesulitan dalam mengkoordinasikan MBM tidak menghambat upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?

“Dalam penerapan MBM ini pasti adanya hambatan atau kendala, akan tetapi kami disini melakukan segala upaya agar hambatan tersebut tidak menghambat pelaksanaan MBM di madrasah ini, dengan musyawarah dan mengumpulkan saran-saran insyaallah akan mendapatkan solusi-solusi yang diinginkan”.⁵⁹

Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana bapak mengatasi ketidakpahaman terkait peran dan tanggung jawab baru dalam penerapan MBM?

“Dengan adanya pelatihan dan rapat yang dilakukan rutin setiap bulannya, kami para guru memahami betul bagaimana pelaksanaan MBM

⁵⁷ Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

⁵⁸ Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

⁵⁹ Wawancara Dengan Guru MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

agar pelaksanaan MBM berjalan dengan baik, dan juga dengan kerjasama tim yang bagus juga”.⁶⁰

Kesimpulan yang dapat dirangkum setelah wawancara bersama Kepala Sekolah, Wakabid Kurikulum dan seorang guru ialah bentuk kerjasama tim yang baik adalah suatu langkah awal yang bagus dalam menjalankan sebuah proses pendidikan. Dengan kerjasama baik pula segala permasalahan akan mudah untuk diselesaikan dan dicari solusi bersama. Salah satunya dengan melaksanakan rapat rutin bersama seluruh stakeholder, masyarakat dan komite madrasah dan melaporkan seluruh hasil kerja dari setiap tenaga kerja. Dan juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan MBM yang bertujuan untuk memperdalam ilmu MBM agar implementasi MBM di MAS Misbahul Ulum terlaksana dengan baik dan sempurna. Kemudian, bentuk kerjasama dengan masyarakat juga harus dimaksimalkan dengan baik.

2. Menganalisis Tahapan-Tahapan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe

Manajemen berbasis madrasah (MBM) adalah salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta dalam mengelola sekolahnya secara mandiri. Yang mana kebijakan ini sangat berdampak positif apabila diimplementasikan dengan baik begitu juga sebaliknya.

⁶⁰ Wawancara Dengan Guru MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

Untuk mengetahui bagaimana penerapan MBM yang dilakukan di MAS Misbahul Ulum, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Sekolah sesuai dengan instrumen wawancara peneliti. Pertanyaan pertama yaitu: apa strategi yang bapak terapkan dalam mewujudkan kemandirian madrasah, baik dari segi kemandirian pembiayaan atau kemandirian kurikulum sehingga tercapainya akreditasi A?

“Langkah awal yang dilakukan madrasah adalah menyusun atau merancang segala kebutuhan baik dari SDM nya tersendiri maupun kurikulumnya. Terlebih lagi sekarang di MAS Mibahul Ulum sudah menerapkan kurikulum merdeka yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Perencanaan tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama antara kepala sekolah, guru-guru dan juga dengan masyarakat di dalam rapat, karena dengan diawali kerjasama tim yang baik maka akan menghasilkan mutu yang baik pula”.⁶¹

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kedua, bagaimana madrasah memfasilitasi siswa/i untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sehingga madrasah mampu mempertahankan akreditasi A?

“MAS Misbahul Ulum merupakan madrasah swasta yang didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat Paloh dan sekitarnya yang perekonomiannya rendah dalam menunjang kebutuhan pendidikan, dan kepada siswa/i pun mereka tidak membayar apapun kepada pihak madrasah, semuanya sudah tersedia di madrasah ini. Namun, kebutuhan-kebutuhan pribadi siswa/i tersendiri itu terlepas dari pada tanggung jawab madrasah seperti seragam sekolah, seragam olahraga dan sebagainya”.⁶²

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan ketiga, bagaimana upaya konkret yang dilakukan madrasah untuk memastikan kemitraan yang efektif

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁶² Wawancara dengan Kepala Sekolah MAS Mibahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

antara madrasah dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, dinas pendidikan, kementerian agama dan pihak lainnya?

“Madrasah melakukan pendekatan baik dari pihak kedinasan atau kementerian, dengan masyarakat, dan juga dengan tokoh-tokoh agama bertujuan agar pendidikan yang diajarkan tidak lari dari pada ajaran islam dan terutama juga sesuai dengan visi misi madrasah”.⁶³

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah adalah apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?

“Mayoritas masyarakat di kampung tersebut masih sangat kurang dalam hal kerja sama, dari pihak madrasah sendiri sudah mengajak masyarakat untuk bekerjasama seperti mendapatkan siswa/i yang bolos atau ada yang merokok atau hal apapun itu agar masyarakat lebih sigap untuk melaporkan kepada pihak madrasah. Khususnya juga kepada wali murid lebih ditekankan dalam hal kedisiplinan anak baik ketika mengantar anak-anaknya ke sekolah karena dalam hal itu juga wali murid memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan akreditasi madrasah. Kerjasama dengan masyarakat sudah berjalan walaupun belum sempurna. Ketika sebuah lembaga sudah dinyatakan sempurna bukan hanya lembaga yang mendapatkan pujian tetapi, tempat dimana lembaga tersebut berada juga akan dipuji dan dikenal baik”.⁶⁴

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti ialah, bagaimana madrasah memastikan adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dalam mempertahankan akreditasi A?

“Dalam menjalankan roda pendidikan di MAS Misbahul Ulum yang pertama harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

⁶³ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁶⁴ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

Pertanggungjawaban ini diperuntukkan kepada yayasan, lembaga, wali murid, dan kepada instansi pemerintah seperti kemenag, dinas dan kepada semua instansi lembaga pendidikan akan dilaporkan hasil akhir. Pertanggungjawaban kepada wali murid akan dilaporkan hasil evaluasi pendidikan siswa/i seperti kedisiplinan anak. Kepada pemerintah akan dilaporkan hasil akhir, seperti jumlah lulusan siswa/i, jumlah siswa/i yang mendapatkan undangan untuk melanjutkan perkuliahan baik negeri, swasta dan juga yang mandiri”.⁶⁵

Peneliti juga mewawancarai Wakabid Kurikulum sebagai subjek penelitian kedua, dengan pertanyaan pertama yang peneliti ajukan adalah, apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan siswa/i memiliki disiplin diri yang tinggi dalam mematuhi tata tertib madrasah?

“Madrasah sendiri sudah menetapkan aturan-aturan yang harus diterapkan oleh siswa/i, yang mana merupakan sebuah aturan yang membawa menjadi kebiasaan yang baik bagi siswa/i di madrasah, mulai dari jadwal masuk sekolah sampai jadwal perpulangan sekolah dan bagi yang terlambat atau sengaja tidak masuk sekolah maka akan diberikan hukuman”.⁶⁶

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kedua, bagaimana sekolah memfasilitasi siswa/i untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri dan mengatur tujuan belajar secara mandiri sehingga dapat mempertahankan akreditasi A?

“Fasilitas di MAS Misbahul Ulum sudah terpenuhi dengan baik seperti program kaligrafi, tahfidzul qulran, silat, semuanya sudah tersedia dengan baik dan siswa/i tinggal memilih dibidang mana yang mereka minati. Untuk pembelajarannya sendiri madrasah sudah menerapkan kurikulum merdeka”.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Dengan Kepala Sekolah MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 06 Juni 2024

⁶⁶ Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

⁶⁷ Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

Pertanyaan selanjutnya ialah apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?

“Madrasah sudah melakukan rapat rutin dan menghadirkan tokoh masyarakat, wali murid dan didalam rapat pihak madrasah menampung saran-saran dari berbagai pihak yang dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada”.⁶⁸

Dan peneliti juga mewawancarai seorang guru, pertanyaan pertama, bagaimana memastikan adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah dalam menjalankan kegiatan pendidikan dalam mempertahankan akreditasi A?

“Para guru-guru dan stakeholder bertanggungjawab dalam menjalankan proses pembelajaran, dan juga bentuk kerjasama kami dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kami buktikan dengan hasil laporan siswa/i kepada wakabid kurikulum dan kepala sekolah”.⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepala sekolah, wakabid kurikulum, dan seorang guru bahwa implementasi ialah penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan untuk memenuhi sebuah tujuan yang diharapkan. Implementasi MBM yang diterapkan di MAS Misbahul Ulum telah terealisasi dengan baik. Langkah awal yang dilakukan ialah merancang atau menyusun segala kebutuhan-kebutuhan madrasah dengan matang,

⁶⁸ Wawancara Dengan Wakabid Kurikulum MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

⁶⁹ Wawancara Dengan Guru MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe 07 Juni 2024

menyediakan fasilitas yang baik agar siswa/i merasa nyaman dalam proses pembelajaran.

Proses ini dilakukan secara kerjasama yang baik, bersama seluruh stakeholder, masyarakat, serta instansi pemerintah dan dibuktikan dengan dengan laporan-laporan siswa/i kepada wakabid kurikulum dan kepala sekolah, laporan-laporan madrasah kepada atasan. Dan juga melaksanakan evaluasi rutin guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi dalam waktu tertentu.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe terkait implementasi manajemen berbasis madrasah dalam mempertahankan akreditasi, maka pembahasan hasil penelitian tersebut adalah:

1. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi MBM Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe.

Dalam pelaksanaan sebuah aturan atau ketetapan pendidikan terkhususnya manajemen berbasis madrasah pastinya tidak akan semudah yang dibayangkan, pastinya akan melalui hambatan-hambatan yang ada. Dan pastinya dengan berbagai macam cara madrasah akan meminimalisir hambatan yang ada. Dengan memahami strategi, prinsip-prinsip dan juga mekanisme bagaimana penerapan MBM dengan baik, maka kepala sekolah akan mampu menjalani, menerapkan MBM tersebut dengan baik.

Menurut Nanang Fatah dalam bukunya konsep manajemen berbasis sekolah dan dewan sekolah terdapat enam hambatan dalam menjalankan manajemen berbasis madrasah, yaitu kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBM, tidak efisien, memerlukan pelatihan khusus, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBM, kesulitan koordinasi, kepala sekolah kurang memahami penerapan MBM.⁷⁰

MAS Misbahul Ulum setiap bulannya mengadakan rapat rutin yang bertujuan agar MBM terimplementasi dengan baik, menyelenggarakan sosialisasi MBM bertujuan agar tenaga pengajar lebih memahami bagaimana sistematis implementasi MBM.

Kerjasama tim juga sangat dibutuhkan dalam bekerja, membangun bersama-sama pendidikan di madrasah agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kepala madrasah dengan perangkat-perangkat madrasah. Dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari lembaga pendidikan bertujuan agar guru-guru dapat lebih memahami mekanisme penerapan MBM tersendiri dan meminimalisir hambatan yang mungkin akan terjadi. Namun, kenyataan yang terjadi bahwa bentuk kerjasama antara madrasah dengan masyarakat belum maksimal, usaha yang dilakukan oleh pihak Humas harus ditingkatkan kembali, dengan faktor kurangnya kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap madrasah, karena bentuk kerjasama dengan masyarakat merupakan salah satu bentuk dalam mempertahankan akreditasi madrasah.

⁷⁰ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), h.38

2. Analisis Tahapan-Tahapan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Lhokseumawe

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi manajemen madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe, bahwasanya pelaksanaan MBM di MAS Misbahul Ulum sudah sangat baik mulai dari kemandirian madrasah yang baik, pengelolaan yang baik dan sesuai dengan segala prinsip-prinsip dan ketentuan yang sudah ada. Sesuai dengan teori Rohiat pada bukunya *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional yang menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan implementasi MBM diantaranya yaitu:*⁷¹

a) Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian, MAS Misbahul Ulum dalam mempertahankan akreditasi sudah melaksanakan tahapan pertama yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi MBM bertujuan untuk memperluas ilmu tentang MBM dan mempermudah para stakeholder dalam melaksanakan manajemen berbasis madrasah. Sosialisasi MBM dilakukan di tiap awal tahun pembelajaran dan dipertengahan tahun pembelajaran, menghadirkan orang-orang dari pihak

⁷¹ Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan...*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h.68-74

lembaga pendidikan untuk menyalurkan ilmu-ilmu MBM guna untuk mempertahankan akreditasi madrasah.

b) Memperbanyak Mitra Sekolah

MAS Misbahul Ulum sudah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, diantaranya Kankemenag, Kemendikbud, dan juga organisasi-organisasi keamanan seperti Brimob, Satpol PP, Wilayahul Hisbah (WH), dan juga kerjasama dengan masyarakat merupakan bentuk mitra madrasah dan harus dimaksimalkan supaya proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

c) Merumuskan Aturan Sekolah

Pergeseran dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis madrasah memerlukan peninjauan kembali terhadap aturan madrasah. MAS Misbahul Ulum sudah meninjau kembali hal tersebut, menyesuaikan aturan-aturan dari pusat dengan aturan-aturan madrasah sesuai dengan tuntutan MBM.

d) Menerapkan Prinsip-Prinsip MBM yang Baik

MAS Misbahul Ulum sudah menerapkan seluruh prinsip-prinsip MBM dengan sangat baik, pengelolaan atau tata pemerintahan meliputi partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan kedepan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi serta kepastian jaminan hukum.

e) Mengklarifikasi Fungsi dan Aspek Manajemen Pendidikan Madrasah

Fungsi manajemen pendidikan madrasah terdiri dari empat fungsi, pertama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara keseluruhan sudah diterapkan di MAS Misbahul Ulum, bertujuan agar proses pembelajaran di MAS Misbahul Ulum terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian secara aspek pendidikan juga sudah terpenuhi di MAS Misbahul Ulum diantaranya kurikulum, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kesiswaan, keuangan, penilaian, hubungan sekolah dan masyarakat, pendidikan lingkungan hidup, penanggulangan narkoba dan sebagainya.

f) Meningkatkan Kapasitas Sekolah

Kapasitas sekolah perlu dilakukan dengan berbagai upaya, MAS Misbahul Ulum sudah meningkatkan kapasitas madrasah dengan melaksanakan aturan madrasah yang tercantum didalam Gerakan Disiplin Guru (GDG). Melakukan sosialisasi tentang praktik-praktik MBM serta evaluasi MBM.

g) Meresdritibusi Kewenangan dan Tanggung Jawab

Kewenangan dan tanggungjawab tidak hanya dibebankan kepada kepala madrasah, tetapi disebarluaskan kepada seluruh stakholder madrasah. Hal tersebut diimplementasikan dengan baik di MAS Misbahul Ulum, bekerja sama serta memiliki tim kerja yang kompak sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.

h) Menyusun Rencana Pengembangan Madrasah, Melaksanakan, Memonitor dan Mengevaluasimya

Pada dasarnya MAS Misbahul Ulum sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dengan sangat baik, diawali penyusunan atau merancang program pendidikan, kebutuhan madrasah baik SDM atau kurikulum kemudian melaksanakan segala program pendidikan dan mengevaluasi seluruh hasil perkembangan untuk melihat sejauh mana proses MBM terlaksana.

Dengan pelaksanaan MBM yang baik maka lembaga pendidikan juga akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik pula dengan dibuktikan tercapainya akreditasi yang unggul (A) dan juga sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga akan menarik perhatian minat calon siswa/i yang akan melanjutkan pendidikan keatas.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan ada 2 kesimpulan pada implementasi manajemen berbasis madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe, yaitu:

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan MBM di MAS Misbahul Ulum yaitu kurangnya bentuk kerjasama antara madrasah dengan masyarakat dalam pelaksanaan MBM. MAS Misbahul Ulum telah mampu mengatasi hambatan tersebut dengan faktor-faktor pendukung diantaranya dengan cara selalu mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan MBM dan juga melibatkan masyarakat disetiap rapat penting yang menghadirkan dari berbagai pihak madrasah seperti yayasan dan komite, bermusyawarah, mendengarkan masukan-masukan atau saran. Kemudian madrasah juga mampu mempertahankan akreditasi dengan menjalankan rapat rutin serta mengadakan penyegaran baik diawal tahun ajaran baru atau pertengahan tahun ajaran baru dan mengadakan penyuluhan dengan menghadirkan dari berbagai lembaga pendidikan guna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah sehingga MAS Misbahul Ulum mampu mempertahankan akreditasi yang sudah unggul (A).
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan MBM di MAS Misbahul Ulum sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya, mencakup melakukan sosialisasi,

memperbanyak mitra sekolah, merumuskan aturan sekolah, menerapkan prinsip-prinsip MBM yang baik, mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan madrasah, meningkatkan kapasitas madrasah, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya. Demi keberlangsungan MBM yang baik madrasah juga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah dan juga dengan masyarakat agar mutu pendidikan di madrasah tersebut tetap terjaga kualitasnya, karena dengan adanya mutu pendidikan yang baik maka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik pula.

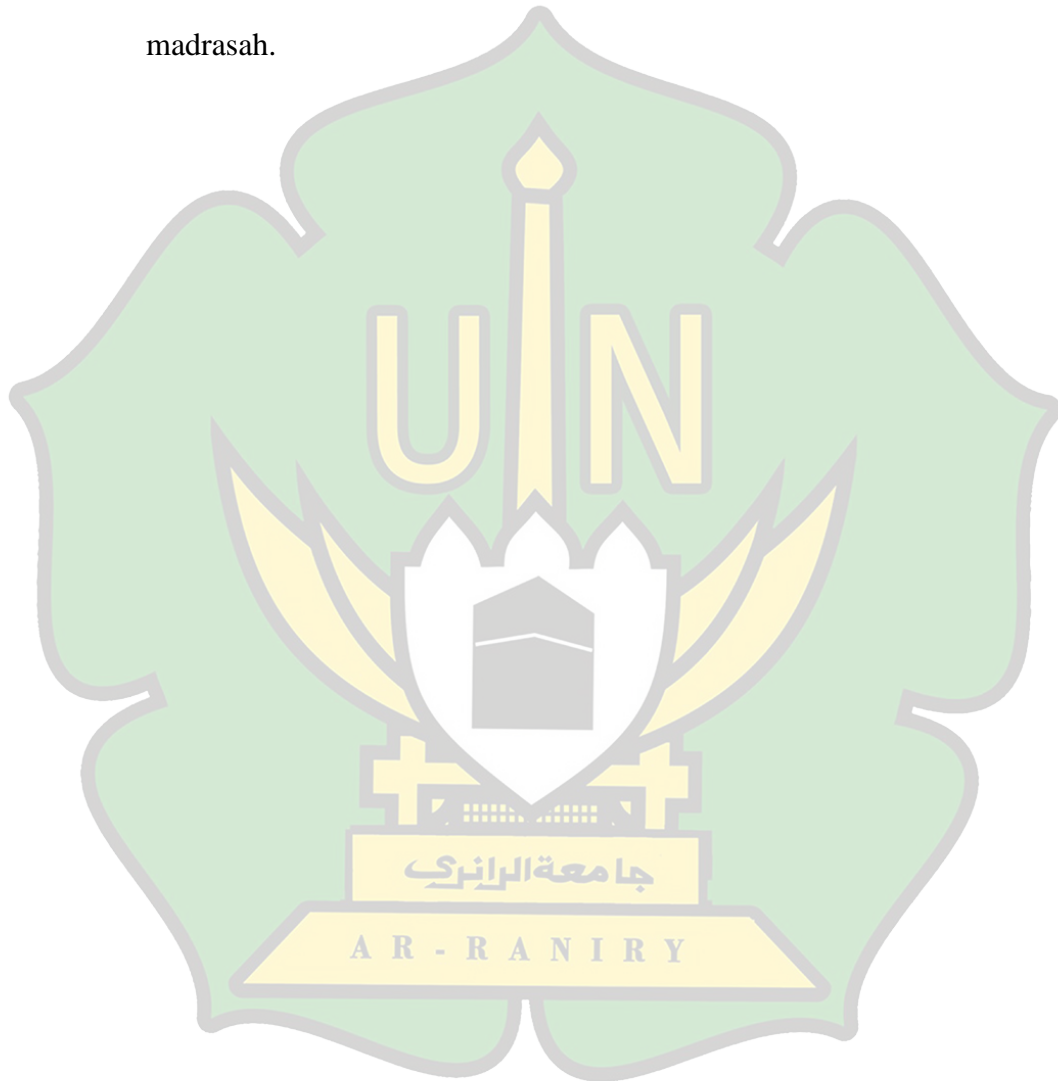
B. Saran

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian di MAS Misbahul Ulum sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada madrasah agar dapat melakukan upaya lebih dalam bekerjasama dengan masyarakat sekitar, guna menghindari kesalahpahaman antara pihak madrasah dengan masyarakat itu sendiri.
2. Diharapkan kepada Kepala Sekolah agar terus mempertahankan akreditasi sekolah dengan selalu memberikan motivasi kepada seluruh stakeholder di madrasah. Dan juga tetap bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mempertahankan akreditasi di madrasah.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan informasi tambahan kepada madrasah-madrasah lain, karena pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dalam mempertahankan akreditasi di madrasah membutuhkan

usaha maksimal dan menjadi faktor utama dalam menunjang kualitas madrasah yang baik.

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu mengembangkan dan memperdalam hasil penelitian berkaitan pelaksanaan manajemen berbasis madrasah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Amat Nyoto dkk *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan madrasah Tahun 2023*.(Jakarta Selatan:BAN-S/M, 2023)
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta,2011)
- Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sekolah*, (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2000)
- Diakses dari <http://e-repository.unsyiah.ac.id/PEAR/article/download/7512/6183>, pada tanggal 07 November 2023
- Diaksesdarihttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/download/578/pdf_17, pada tanggal 07 November 2023
- Diaksesdari<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/download/1906/2011/4514>, pada tanggal 07 November 2023
- Diaksesdari<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp/article/download/3443/2145>, pada tanggal 07 November 2023
- Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd “*Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi dalam Aktivitas Manajerial di Sekolah atau Madrasah*,”(Yogyakarta:LkiS,2020)
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka, Jakarta, 2004)
- Hidayat dan Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan*. (Bandung : Kaukaba 2012)
- M Sufyarma, *Kapita Salekta Manajemen Pendidikan*. (Bandung : Alfabata 2003)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mulyasa, *Manajemen Kurikulum Merdeka* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2023)


- Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003)
- Nur Hidayah. *Manajemen Madrasah Menjadi Insan Berdaya Abad 21*. (Jawa Barat 2020 : Goresan Pena)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002)
- Qibtiah, Elin Asrofah; Retnowati, Rita; Laihad, Griet Helena. 2018. *Manajemen Madrasah Alam Dalam Pengembangan Karakter Pada Jenjang Madrasah Dasar Di School Of Universe*. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.6, No.2, Juli 2018, 627).
- Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995)
- Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988)
- Sulaiman, Hasmiana, Asmaini, *Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SD Negeri 10 Banda Aceh*. *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 3 No.3, April 2015, h. 33- 43
- Suparlan, *Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dari Teori sampai dengan Praktik*. (Jakarta : Bumi Aksara 2013)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi ...* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), h.157
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta : BumiAksara 2009)

Wahab, dkk. *Tiga Pilar Manajemen Mutu Madrasah Ideal (Sebuah Bunga Rampai Tentang Implementasi Tiga pilar MBM di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat)*. (Yogyakarta. CV Arti Bumi Intaran 2015)

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)



LAMPIRAN-LAMPIRAN


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-4322/Un.08/TK/Kp.07.6/05/2024

TENTANG:
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi;
- bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/Krnk.05/2011, tentang penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

KESATU Menunjukkan Saudara :

Dr. Safrudi, M.Pd
Untuk membimbing Skripsi

Nama : Muhammad Zian Rizki
NIM : 200 206 004
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbaitul Ulum Lhoksemawe

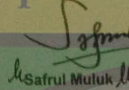
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya diatas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor SP.DIPA-025.04.2.423925/2024 Tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama enam bulan sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2024
Dekan,


Safrudi Muluk

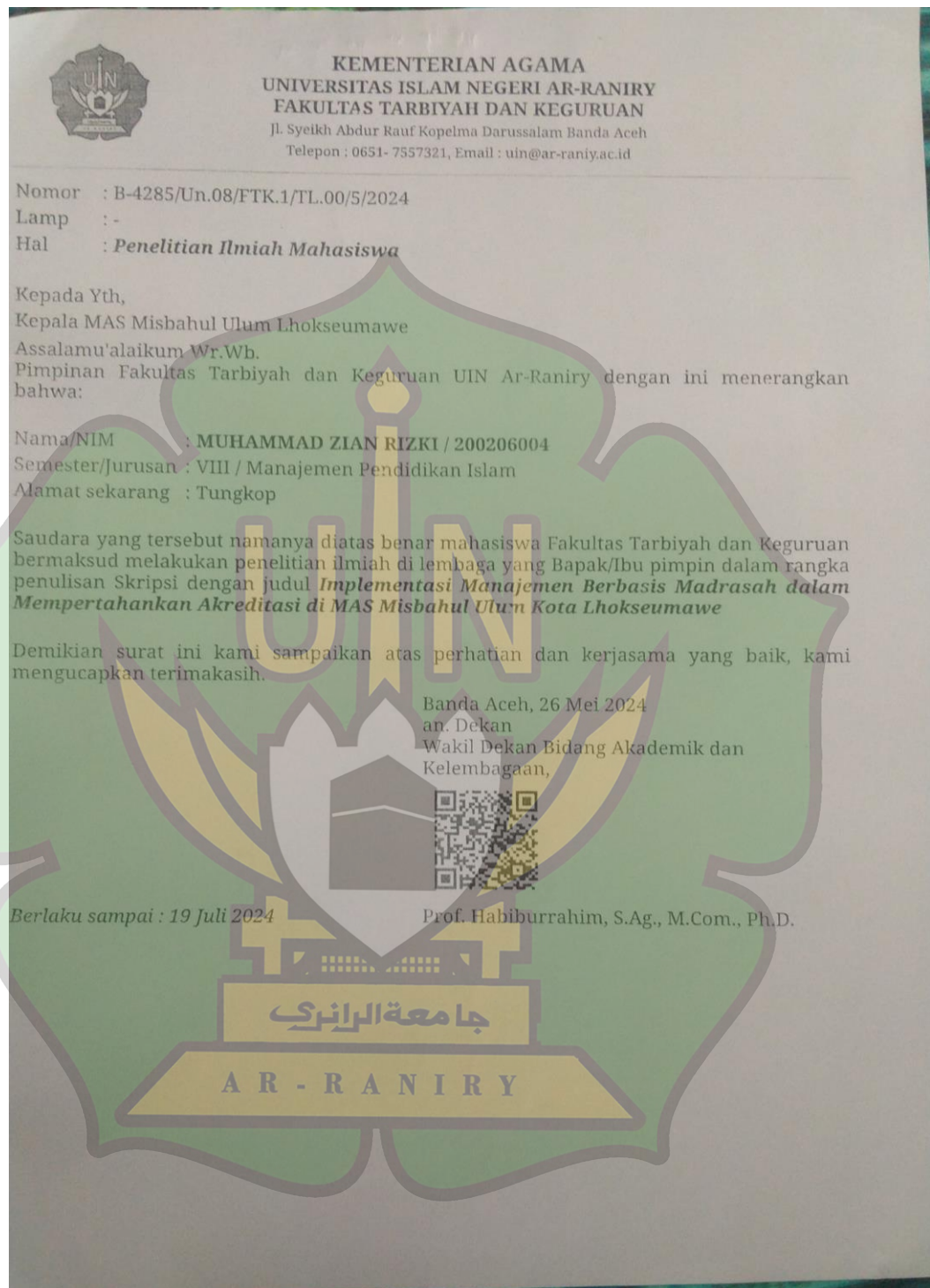
AR-RANIRY

Tembusan

- Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kantor Pelayanan Pendelegasian Negara (KPPN) di Banda Aceh;
- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
- Yang bersangkutan
- Arsip



Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LHOKEUMAWA
MADRASAH ALIYAH MISBAHUL ULUM (MA)
 Jalan Tgk. Chik di Paloh Simpang IV Paloh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
 Email: ma_misbahululum@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Ma.01.200 / 008 / 2024

Kepala Madrasah Aliyah Misbahul Ulum Paloh Kecamatan Muara Satu Pemerintahan Kota Lhokseumawe menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Zian Rizki
 NIM : 200206004
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Baru Dusun Jeumpa. Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe

Telah melaksanakan penelitian (research) pada Madrasah Aliyah Misbahul Ulum Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tanggal 08 Juni 2024

Dengan judul Penelitian: **“Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe”**. Dan dipihak kami sangat mendukung penelitian yang dilakukan Mahasiswa tersebut.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 01 Agustus 2024
 Ka. MA Misbahul Ulum

 Basballah, S.Pd.I., M.Pd
 NIP. -

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

**Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM**

Identitas Informan

Nama : Hasballah, S.Pd.I, M.Pd

Agama : Islam

Profesi : Kepala Madrasah

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zian Rizki dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Informan**

Hasballah, S.Pd.I, M.Pd

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

**Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM**

Identitas Informan

Nama : Zahraini, M.Pd

Agama : Islam

Profesi : Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zian Rizki dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Informan

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Zahraini, M.Pd

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

**Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM
MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM**

Identitas Informan**Nama : Saidatunnisa, S.Pd****Agama : Islam****Profesi : Guru**

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zian Rizki dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024**Informan****Saidatunnisa S.Pd.I**

LEMBAR OBSERVASI

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM

MEMPERTAHANKAN AKREDITASI DI MAS MISBAHUL ULUM KOTA

LHOKSEUMAWE

No	Objek Observasi	Hasil Observasi	
		Baik	Kurang Baik
1	Kurikulum	MAS Misbahul Ulum sudah menerapkan sistem kurikulum merdeka	
2	Bahan Mengajar	Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kurikulum merdeka, dan setiap guru membuat RPP sebagai pedoman ajar yang akan diterapkan kepada siswa/i	
3	Rapat Evaluasi	Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah, setiap	

		<p>bulannya madrasah melakukan rapat evaluasi guna membahas perkembangan pelaksanaan MBM di madrasah</p>	
4	Kinerja Mengajar	<p>Kepala madrasah serta seluruh dewan guru di MAS Misbahul Ulum bertinteraksi aktif dalam menerapkan sistem pembelajaran di madrasah, mematuhi aturan-aturan madrasah sesuai dengan buku pedoman gerakan disiplin guru (GDG) dan juga sebagai penunjang dalam mempertahankan akreditasi madrasah</p>	
5	Prestasi Akademik	<p>Prestasi yang sudah diperoleh di MAS</p>	

		Misbahul Ulum sudah terakreditasi A, dengan penerapan MBM yang baik dan sistematis dapat mempertahankan akreditasi	
6	Tenaga Pengajar	Tenaga pengajar sudah memadai dibuktikan dengan ijazah pendidikan, baik yang sudah S2 ataupun pendidikan lanjutan	
7	Pertanggungjawaban Madrasah	Pertanggungjawaban madrasah dibuktikan dengan laporan-laporan yang diserahkan kepada yayasan dan komite	
8	Ruang Guru	Ruang guru sudah sangat baik, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dan kebutuhan guru dan dibuktikan di dokumentasi	

9	Kerjasama Antar Lembaga dan masyarakat	Pihak Humas sudah mengajukan kerjasama bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan, dari Kankemenag, Kemendigbud dan juga melakukan kerjasama dengan pihak keamanan seperti Brimob	Bentuk kerjasama MAS Misbahul Ulum dengan masyarakat masih belum maksimal dan dibutuhkan usaha lebih yang harus dilakukan oleh bidang humas agar kerjasama yang terjalin dengan masyarakat lebih kuat dan sebagai bentuk mempertahankan akreditasi
10	Bangunan Sekolah	Bangunan madrasah tergolong bangunan yang baik, memiliki bangunan yang kokoh, sesuai dengan standar dan didukung dengan sarana prasana yang memadai	

LEMBAR WAWANCARA

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Mempertahankan

Akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan			
		Indikator	Kepala Sekolah	Waka Kurikulum	Guru
1	Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi MBM dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe?	<p>1). Faktor Penghambat</p> <p>a. Kepala sekolah kurang memahami penerapan MBM</p> <p>b. Kesulitan stakeholder dalam koordinasi MBM</p> <p>c. Stakeholder kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBM</p> <p>d. Ketidakpahaman stakeholder terhadap peran dan tanggung jawab baru</p>	<p>1. Dalam pelaksanaan MBM, apakah bapak masih merasakan kesulitan dalam menerapkan MBM di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?</p> <p>2. Apa strategi yang anda terapkan untuk memastikan bahwa penerapan MBM memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan</p>	<p>1. Apa strategi yang bapak/ibu terapkan untuk memastikan bahwa penerapan MBM memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa di madrasah dalam</p>	<p>1. Apa langkah konkret yang telah bapak/ibu ambil untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antara stakeholder dalam konteks penerapan MBM, dan bagaimana bapak/ibu mengidentifikasi serta</p>

		<p>dalam implementasi MBM</p> <p>(Nanang Fatah, <i>Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah</i>. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), h. 38).</p>	<p>dan pengalaman belajar siswa di madrasah?</p> <p>3. Apa langkah konkret yang telah bapak ambil untuk memastikan bahwa penerapan MBM di madrasah ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya? Dan bagaimana anda mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses ini?</p> <p>4. Apa langkah-langkah yang bapak terapkan dalam upaya mengatasi kurangnya minat dari stakeholder</p>	<p>mempertahankan akreditasi A?</p> <p>2. Apa langkah konkret yang telah bapak/ibu ambil untuk memastikan bahwa penerapan MBM di madrasah ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya? Dan bagaimana anda mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses ini dalam mempertahankan akreditasi A?</p> <p>2. Apa strategi yang bapak/ibu terapkan untuk memastikan bahwa kesulitan dalam mengkoordinasikan MBM tidak menghambat upaya perbaikan</p>	<p>mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses ini dalam mempertahankan akreditasi A?</p> <p>2. Apa strategi yang bapak/ibu terapkan untuk memastikan bahwa kesulitan dalam mengkoordinasikan MBM tidak menghambat upaya perbaikan</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>2). Faktor Pendukung</p>	<p>untuk terlibat dalam pengelolaan MBM dalam mempertahankan akreditasi A?</p>		<p>kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?</p> <p>3. Bagaimana Bapak mengatasi ketidakpahaman terkait peran dan tanggung jawab baru dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)?</p>
--	--	-----------------------------	--	--	---

	<p>a. Meningkatkan mutu SDM dan profesionalitas kepala sekolah, guru dan pengawas</p> <p>b. Adanya kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait</p> <p>c. Mengadakan penyuluhan tentang tingkat pendidikan</p> <p>d. Melaksanakan pertemuan mengembangkan rencana kegiatan, evaluasi</p>	<p>1. Apakah SDM di MAS Misbahul Ulum sudah memadai dan bekerja dengan baik di bidang masing-masing dalam pelaksanaan MBM di madrasah?</p> <p>2. Bagaimana bentuk kerjasama dari pada pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait untuk tercapainya pelaksanaan MBM dalam mempertahankan akreditasi A?</p>	<p>1. Apakah segala program MBM telah disusun dengan baik dan transparan dan dipertanggung jawabkan dengan baik?</p>	
--	--	--	--	--

		kegiatan, dan evaluasi hasil e. Menyusun pertanggung jawaban program secara transparan dan akuntabel	3. Apakah madrasah sudah mengadakan penyuluhan tentang tingkat pendidikan untuk meluaskan wawasan mengenai pelaksanaan MBM? 4. Dalam rapat bulanan, apakah MBM dijadikan topik utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan MBM di madrasah?		
1	Bagaimana analisis	a. Melakukan sosialisasi MBM b.	1. Apa strategi yang bapak terapkan	1. Apa strategi yang bapak	1. Apa langkah-

<p>Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam mempertahankan akreditasi di MAS Misbahul Ulum Kota Lhokseumawe?</p>	<p>Memperbanyak Mitra Madrasah/sekolah</p> <p>h</p> <p>c. Merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah serta kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah</p> <p>d. Menerapkan prinsip-prinsip MBM</p> <p>e. Mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah/madrasah</p> <p>f. Meningkatkan kapasitas madrasah/sekolah</p> <p>h</p> <p>g. Meredistribusi kewenangan dan tanggungjawab</p>	<p>dalam mewujudkan kemandirian madrasah baik dari segi kemandirian pembiayaan atau kemandirian kurikulum sehingga tercapainya akreditasi A?</p> <p>2. Bagaimana madrasah memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri dan mengatur tujuan belajar secara mandiri sehingga dapat mempertahankan akreditasi A?</p> <p>3. Bagaimana upaya</p>	<p>terapkan dalam mewujudkan kemandirian sekolah baik dari segi kemandirian pembiayaan atau kemandirian kurikulum sehingga tercapainya akreditasi A?</p> <p>2. Bagaimana langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan siswa memiliki disiplin diri yang tinggi dalam mematuhi tata tertib sekolah dalam</p>	<p>langkah yang telah diambil untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?</p> <p>2. Bagaimana madrasah memastikan adanya</p>
--	--	--	--	--

		<p>h. Menyusun rencana pengembangan sekolah, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya</p> <p>(Rohiat, <i>Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional</i> (Bandung: PT Refika Aditama, 2010, h.68-74)</p>	<p>konkret yang dilakukan sekolah untuk memastikan kemitraan yang efektif antara madrasah dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, dinas pendidikan, kementerian agama dan lain-lain?</p> <p>4. Apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan pasrtisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam</p>	<p>mempertahankan akreditasi A?</p> <p>3. Bagaimana sekolah memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri dan mengatur tujuan belajar secara mandiri sehingga dapat mempertahankan akreditasi A?</p> <p>4. Apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan pasrtisipasi aktif dari masyarakat</p>	<p>akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dalam mempertahankan akreditasi A?</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>mempertahankan akreditasi A?</p> <p>5. Bagaimana madrasah memastikan adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dalam mempertahankan akreditasi A?</p>	<p>dalam mendukung upaya perbaikan kinerja dan mutu pendidikan di madrasah dalam mempertahankan akreditasi A?</p>	
--	--	--	---	---	--



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Sekolah



Gambar 2. Wawancara dengan Wakabid Kurikulum



Gambar 3. Ruang Kepala Sekolah



Gambar 4. Ruang Belajar Siswa



Gambar 5. Ruang Guru



Gambar 6. Struktur Organisasi Sekolah



Gambar 7. Sertifikat Akredita



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Muhammad Zian Rizki

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat /Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 11 Agustus 2001

Asal : Lhokseumawe

Alamat : Jl. Baru, Meuria Paloh, Kec. Muara
Satu Kota Lhokseumawe

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

No. HP : 0812-6429-1185

Email : zianrizki04@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MIN Meuria Paloh : 2007-2013
2. SMP 6 Lhokseumawe : 2013-2016
3. Pesanteren Moderen Misbahul Ulum : 2016-2020
4. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2020-Sekarang

Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua Organisasi Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum
2. Ketua Bidang pendidikan di HMP-S MPI
3. Wakil Ketua IMMAPSI Wilayah 1 Daerah Aceh